

**Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB
Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2015 - 2022**



Oleh:

Nama : Hanif Miftah Maulana
Nomor Mahasiswa : 20313062
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2024

HALAMAN JUDUL

Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2015 - 2022

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembanguna,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Hanif Miftah Maulana
Nomor Mahasiswa : 20313062
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Penulis,



Hanif Miftah Maulana

PENGESAHAN

Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2015 - 2022

Nama : Hanif Miftah Maulana
Nomor Mahasiswa : 20313062
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 16 Juli 2024
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Moh.Bakti Hendrie Anto, S.E., M.Sc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2015 - 2022

Disusun oleh : HANIF MIFTAH MAULANA

Nomor Mahasiswa : 20313062

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 09 Agustus 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Prastowo, SE.,M.Ec.Dev.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan limpahan karunia dan nikmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam kehidupan manusia selama di dunia. Skripsi ini saya persembahkan sebagai karya terakhir saya di jenjang perkuliahan untuk mereka yang sudah siap sedia menemani dan menerima saya dimasa-masa sulit dan berat. Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Mama terkasih dan tersayang Cicih Mintarsih yang tiada hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang. Serta selalu memberikan semangat di setiap proses perkuliahan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai
2. Papa terhebat alm Muh Markum yang selalu memberikan Pelajaran hidup, memberikan fasilitas yang terbaik kepada penulis dan mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih baik
3. Kakak ku Achmed Bramantya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan hasil akhir ini
4. Adik ku Akmal Choirul Ariansyah karena di mata penulis harus menjadi sebagai contoh yang baik dan sebagai kakak yang baik selalu memberikan arahan arahan tentang masa depan yang lebih baik
5. Kepada Azzalia Kerin Syarani yang selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi dalam penyusunan hasil akhir ini
6. Kepada Kanda dan Yunda (Kepada Yakfi Mubharok, Muhammad Yusuf, Raden Prasetya Adi Guna, Arief fajar, Ibu Jamalia, Ibu Dina Eldina, dan Mr. Vezir Ashyrnepesov) yang selalu memberikan dukungan dari segi penguatan mental, dan pelajaran hidup dari mulai bergaul, bertukar pikiran, membicarakan politik, membahas bisnis dan Pelajaran hidup lainnya.
7. Teman – teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 menjadi teman baik selama perkulihan. Kepada teman teman yang termasuk dalam Remaja Rumah Cempedak yang berada di jogja yang selalu ada di suka maupun duka.
8. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya yang telah memebrikan bantuan, dukungan, dan motivasi dalam berbagai bentuk untuk penulis.

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, asholaatu wassalaamu 'alaa Asyrafil-Ambiyai wal-Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin SAW. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehingga kita dapat menuai indahny hidup dan menjadi seorang muslim yang taat. Berkat izin Allah, skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2015 – 2022”. dapat terselesaikan dengan baik.

1. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D., selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan.
3. Bapak Mohammad Bakti Hendrie Anto S.E., M.Sc., Sebagai Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan mendidik saya selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Riska Dwi Astuti, S.Pd., M.Sc.yang sebagai Dosen Pembimbing Akademik telah memberikan nasihat yang berharga selama saya menempuh pendidikan;
5. Para Dosen dan Staf di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang memberikan inspirasi seraya mendorong saya untuk berkembang lebih baik;
6. Orang tua tercinta, almarhum Papa Muh Markum SH. MH. MM., dan Mama Cicih Mintarsih SH, yang doa dan dukungannya menjadi kekuatan saya;
7. Dan tidak lupa kepada saya sendiri, Hanif Miftah Maulana, atas usaha yang tak kenal lelah hingga titik ini.

Dengan demikian, segala sesuatu yang saya kerjakan atas kehendak Allah SWT. Semoga inti dan pembahasan yang telah dituliskan dapat memiliki manfaat bagi

pembaca dalam penelitian. Untuk itu, adanya pemberian saran dan kritik sangat membantu dalam memperbaiki penelitian ini di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan berkat-Nya terhadap Kita semua. Aammiin Ya Rabbal'Alamin. Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by 'M' and 'M'.

Penulis, Hanif Miftah Maulana

MOTTO

Segala sesuatu harus sesuai porsinya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik

-Hanif Miftah Maulana -

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	<i>i</i>
<i>PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI</i>	<i>iv</i>
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i>	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>vi</i>
<i>MOTTO</i>	<i>viii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ix</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>xii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>xiii</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>1</i>
<i>BAB I</i>	<i>2</i>
1.1 Latar Belakang	<i>2</i>
<i>Gambar 1. 3 Dana Otonomi Khusus</i>	<i>5</i>
1.2 Rumusan Masalah	<i>8</i>
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	<i>8</i>
1.3.1 Tujuan Penelitian :	<i>8</i>
1.3.2 Manfaat Penelitian	<i>8</i>
<i>BAB II</i>	<i>10</i>
2.1 Kajian Pustaka.....	<i>10</i>
2.2 Landasan Teori	<i>15</i>
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	<i>15</i>
2.2.2 Konsep Dasar Transfer Ke Daerah.....	<i>16</i>
2.2.3 Dana Otonomi Khusus	<i>17</i>
2.2.4 Dana Alokasi Umum	<i>18</i>
2.2.5 Dana Alokasi Khusus.....	<i>19</i>
2.2.6 Pendapatan Asli Daerah.....	<i>20</i>
2.3. Hubungan Antar Variabel Dependen dan Independen.....	<i>21</i>
2.3.1 Hubungan Antara Dana Otonomi Khusus dan PDRB	<i>21</i>
2.3.2 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dan PDRB	<i>22</i>
2.3.3 Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus dan PDRB.....	<i>23</i>
2.3.4 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan PDRB	<i>23</i>
2.4 Kerangka Pemikiran.....	<i>25</i>
<i>BAB III</i>	<i>26</i>

3.1	Jenis dan Sumber Data	26
3.2	Variabel Penelitian	26
3.2.1	Variabel Terikat (Dependen).....	26
3.2.2	Variabel Independen	26
3.2.3	Dana Otonomi Khusus (DOK) (X1)	26
3.2.4	Dana Alokasi Umum (DAU) (X2)	27
3.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3).....	27
3.2.6	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X4).....	27
3.3	Metode Analisis	27
3.3.1	Metode Common Effect.....	28
3.3.2	Metode Fixed Effect (FEM)	28
3.3.3	Metode Random Effect (REM)	28
3.4	Uji Kesesuaian Model.....	29
3.4.1	Uji Chow Test	29
3.4.2	Uji Hausman Test	29
3.4.3	Uji Signifikansi Common Effect vs Fixed Effect	29
3.5	Pengujian Hipotesis	29
3.5.1	Koefisien Determinasi (R^2)	30
3.5.2	Uji t	30
3.5.3	Uji f	30
BAB IV		31
4.1	Deskripsi Data Penelitian	31
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan	32
4.2.1	Pengujian Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).....	32
4.3	Pemilihan Model Terbaik	33
4.3.1	Uji Chow.....	33
4.3.2	Uji Hausman	34
4.4	Model Terbaik.....	34
4.4.1	Fixed Effect Model.....	35
4.5	Pengujian Statistik	36
4.5.1	Koefisien Determinasi (R^2)	36
4.5.2	Uji Kelayakan Model (Uji F)	36
4.5.3	Uji t	37
4.6	Interpretasi dan Pembahasan	38
4.6.1	Variabel Dana Otonomi Khusus	38
4.6.2	Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)	39
4.6.3	Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK).....	40
4.6.4	Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41
BAB V		43
5.1.	Kesimpulan	43

5.2.	Implikasi	44
------	-----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 PDRB ADHK.....	3
Gambar 1. 2 PDRB PROVINSI PAPUA.....	4
Gambar 1. 3 Dana Otonomi Khusus	5
Gambar 2. 1 Struktur Transfer Ke Daerah dan Desa.....	17
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model.....	32
Tabel 4. 2 Uji Chow.....	33
Tabel 4. 3 Uji Hausman	34
Tabel 4. 4 Fixed Effect Model.....	35
Tabel 4. 5 Uji t-statistika ($\alpha = 5\%$).....	37

ABSTRAK

Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia. Selain itu provinsi papua merupakan wilayah yang mendapatkan kewenangan khusus. Hal ini merujuk kepada otonomi khusus yang di mana wilayah yang di tetapkan mendapatkan kewenangan kewenangan tentang pengelolaan secara mandiri. Sesuai dengan undang undang yang telah di tetapkan oleh negara republik Indonesia melalui UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 kemudian di perbaruhi dengan UU No.33 tahun 2004, dan UU No.21 tahun 2008. Di mana dalam pasal ini membahas tentang hak dan kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan otonomi khusus. Diharapkan dengan memberikan kewenangan otonomi khusus dapat meningkatkan pembangunan di Provinsi Papua. Data yang digunakan ialah data sekunder, yakni data yang berasal dari jejaring internet maupun buku berupa artikel terdahulu, penelitian yang berkaitan, jurnal, publikasi pemerintah maupun situs dan berita lainnya yang mendukung sebagai acuan. Sumber data diperoleh dari Kementrian Keuangan Republik (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Peraturan Gubernur. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dalam kurun waktu 2015 – 2022, sedangkan data cross section terdiri dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua. Adapun data yang meliputi yaitu data, PDRB, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Data panel merupakan penggabungan data antara time series dan cross section. Alat yang digunakan yaitu Eviews 12. Hasil menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap PDRB. Namun, hasil dari dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap PDRB. Lalu, hasil dari dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif sehingga dapat meningkatkan penghasilan dari PDRB yang ada di Kab/Kota Provinsi Papua.

Kata Kunci: PDRB, Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

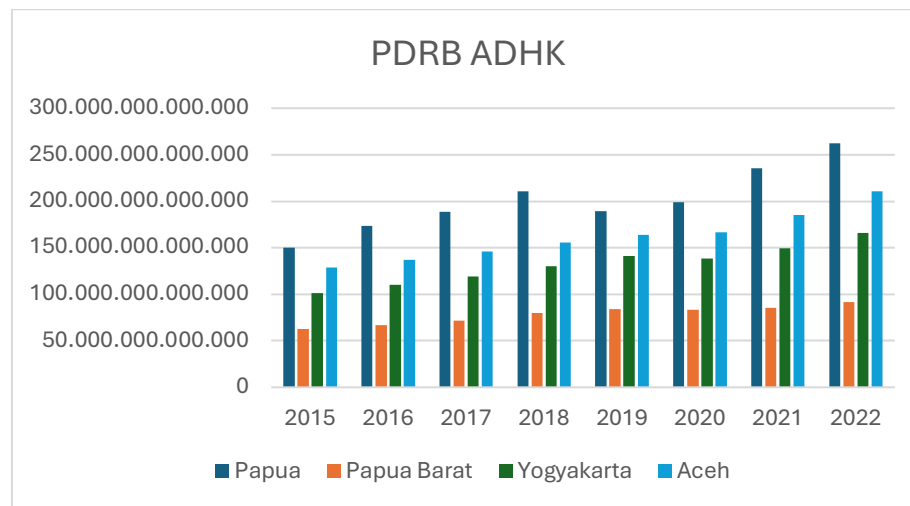
Salah satu dari cita-cita bangsa Indonesia, yang tercakup dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah menjadikan negara yang memiliki kesejahteraan dan masyarakat yang makmur. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan komponen penting dari pembangunan nasional yang diharapkan akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang seimbang, sesuai, dan selaras. (Kuncoro, 2006) Menurut pendapatnya sesungguhnya, untuk mengurangi ketimpangan wilayah, pemerintah akan membuat kebijakan pembangunan daerah berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh seluruh wilayah. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah pusat menentukan suatu konsep dan kekuasaan pemerintah daerah, kemudian setelah banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah pusat memutuskan agar setiap daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengatur kebijakan pembangunan wilayah itu sendiri.

Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia. Selain itu provinsi Papua merupakan wilayah yang mendapatkan kewenangan khusus. Hal ini merujuk kepada otonomi khusus yang di mana wilayah yang ditetapkan mendapatkan kewenangan kewenangan tentang pengelolaan secara mandiri. Sesuai dengan undang undang yang telah ditetapkan oleh negara republik Indonesia melalui UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 kemudian diperbarui dengan UU No.33 tahun 2004, dan UU No.21 tahun 2008. Di mana dalam pasal ini membahas tentang hak dan kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan otonomi khusus. Diharapkan dengan memberikan kewenangan otonomi khusus dapat meningkatkan pembangunan di Provinsi Papua.

Dalam mengembangkan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang perlu diperhatikan dan komitmen dalam penggunaannya. Dengan begitu aspek ini perlu ditegaskan dengan Kaprelian mengembangkan otonomi daerah (Pemendagri, 2009). Dengan ada kewenangan fleksibilitas keuangan, perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah bisa merancang serta

melaksanakan segala potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi daerah dan pelayanan publik daerah tersebut.

Gambar 1. 1 PDRB ADHK



Sumber : Badan Pusat Statistik

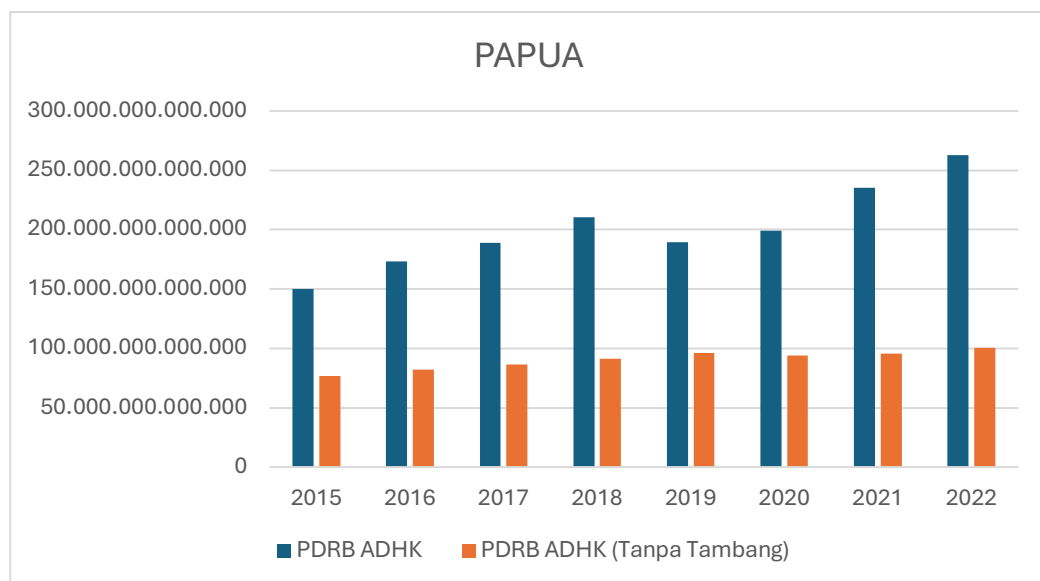
Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa PDRB ADHK Provinsi Papua menempati urutan pertama. Pada tahun 2015 menunjukkan nilai PDRB sebesar 150.307.280.000.000 lalu tahun berikutnya mengalami peningkatan, pada saat tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai PDRB di Provinsi Papua sebesar 210.600.570.000.000 dan menurun menjadi 189.510.700.000.000 pada tahun 2019 kemudian di tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 262.519.790.000.000, sehingga hal ini yang menunjukkan bahwa Provinsi Papua menjadi pilihan yang menarik sebagai objek penelitian dibandingkan Aceh, DIY, dan Papua Barat ketika dilihat dari PDRB ADHK.

Pemilihan provinsi Papua memiliki beberapa alasan kuat. Pertama, Papua menjadi Provinsi dengan PDRB tertinggi di antara Provinsi yang menerima otonomi khusus. Kedua, kontribusi sektor pertambangan yang sangat signifikan terhadap PDRB total Papua menciptakan perubahan struktur ekonomi yang dramatis ketika dihilangkan, memberikan peluang untuk menganalisis ekonomi Papua tanpa ketergantungan pada sektor pertambangan. Ketiga, tantangan pembangunan yang unik di Papua, termasuk infrastruktur terbatas dan kondisi geografis yang sulit,

menjadikannya kasus yang menarik untuk dipelajari. Keempat, fokus pada PDRB tanpa tambang dapat memberikan wawasan tentang potensi diversifikasi ekonomi dan strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan di Papua. Kelima, Papua sangat menarik untuk di teliti dari segi desentralisasi fiskal nya yang melibatkan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu Pendanaan Dana otonomi khusus terhadap PDRB ADHK tanpa tambang memiliki Perbedaan yang cukup signifikan. Berikut table yang menampilkan PDRB ADHK dan Penerimaan Dana Otonomi Khusus.

Tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat diukur sebagai ukuran keberhasilan pembangunannya. Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dengan melihat pertumbuhan ekonomi, yang merupakan proses peningkatan output dari waktu ke waktu. (Todaro & Smith, 2011). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang di gunakan untuk mengukur skala pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maupun wilayah. Pada dasar nya PDRB merupakan representasi dari suatu jumlah nilai barang atau jasa yang di hasilkan dari kegiatan ekonomi yang di hasilkan dari keseluruhan unit produksi di suatu wilayah. Menurut (Mankiw, 2007) nilai semua unit barang dan jasa diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu merupakan representasi dari PDRB. Berikut adalah gambar 1.2 merupakan Kondisi yang terjadi di provinsi papua selama penelitian pada tahun 2015 – 2022.

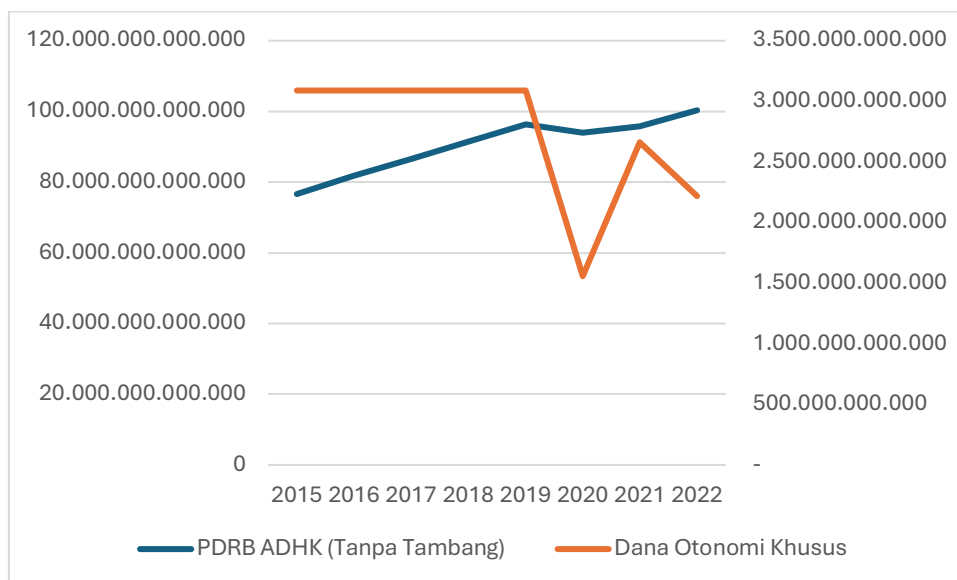
Gambar 1. 2 PDRB PROVINSI PAPUA



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat di lihat dari data di atas yaitu data PDRB ADHK dan PDRB ADHK (Tanpa Tambang) di provinsi papua, menunjukan bahwa PDRB di Provinsi Papua di dorong oleh industri pertambangan hal ini yang membuat peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti papua dengan menggunakan PDRB Tanpa Tambang. Yang di harapkan peneliti mampu mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal yang di berikan kepada provinsi papua. dari data di atas menunjukan bahwa PDRB ADHK (Tanpa Tambang) di Provinsi Papua pada tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB ADHK (Tanpa Tambang) menunjukan nilai 76.625.597.300.000 dan mengalami peningkatan menjadi 96.254.990.260.000 pada tahun 2019 dan menurun sedikit di tahun 2020 menjadi 93.971.881.080.000. yang di akibatkan oleh faktor dari pandemi di tahun tersebut, kemudian perlahan meningkat Kembali dan di penghujung tahun 2022 PDRB ADHK (Tanpa Tambang) di Provinsi Papua menyentuh angka 100.318.645.630.000.

Gambar 1. 3 Dana Otonomi Khusus



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jika di lihat gambar 1.3 menunjukan garis *trend* yang menunjukan adanya Peningkatan PDRB ADHK tanpa tambang dari tahun 2015 sampai 2019 kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang di akibatkan oleh pandemi covid-19

sehingga mengakibatkan ekonomi mengalami penurunan hal ini dapat di lihat dari penurunan PDRB ADHK tanpa tambang di provinsi papua, kemudian di tahun berikutnya mulai adanya peningkatan secara perlahan sampai tahun 2022.

Hal ini berbeda dengan penerimaan Dana Otonomi Khusus di provinsi papua yang di mana pada tahun 2015 sampai tahun 2019 penerimaan Dana otonomi khusus bersifat stagnan dan kemudian menurun di tahun 2020 dan naik di 2021 kemudian turun di 2022. Sehingga Dana Otonomi Khusus di provinsi papua di 3 tahun terakhir bergerak fluktuatif.

Dana Otonomi Khusus adalah jenis dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di wilayah-wilayah tertentu. Dana ini ditujukan untuk daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus atau memiliki potensi besar untuk pembangunan. Dana Otonomi Khusus bertujuan untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah tersebut, dengan fokus pada proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapatkan melalui pungutan pajak di daerah tersebut secara hukum. Dengan adanya pungutan tersebut memberikan pemerintah daerah pemasukan serta kewenangan dalam menentukan dan membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuannya. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah lebih cepat daripada sebelumnya, serta dapat mengoptimalkan peningkatan aktifitas dari sektor sektor yang terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan sektor perdagangan maupun jasa, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah di harapkan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan daerah selama desentralisasi. DAU berasal dari pemerintah pusat, sehingga telah dialihkan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk meningkatkan layanan masyarakat seperti meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan harapan hidup yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal di mana penggunaannya ditanggung sepenuhnya oleh daerah. Dana ini

dialokasikan menggunakan formula yang menunjukkan perbedaan antara kebutuhan fiskal (kebutuhan) dan kapasitas fiskal (kapasitas).

Dana Alokasi Khusus, yang berasal dari APBN, diberikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus seperti investasi dan infrastruktur, yang akan meningkatkan PDRB daerah dalam jangka panjang. Karena aspek kinerja keuangan yang lebih transparan, DAK berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Daerah harus siap untuk menerima beban dan tanggung jawab yang terkait dengan mengelola dan mengurus rumah tangga mereka sendiri jika mereka diberi otonomi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus dapat meningkatkan PAD dengan memanfaatkan berbagai potensi yang tersedia bagi mereka. Dengan kata lain, PAD pemerintah daerah masih rendah, dan akan sulit untuk mendapatkan otonomi yang diharapkan selama daerah terus bergantung pada pusat.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, atau output per kapita dalam jangka panjang adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan memberikan kemandirian dalam menentukan segala kegiatan yang dilakukan dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah. Di harapkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi sumber pendapatan dan mampun merancang serta menetapkan belanja daerah eacara efisien, efektif, ekonomis dan terukur, serta dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah dari sisi kinerja dan tanggung jawab kepada masyarakat umum maupun pemerintah atasnya, dengan begitu pemerintah daerah dapat memenuhi tugasnya untuk membuka peluang kemajuan daerah. Hal ini yang menjadikan mengapa penulis mengambil Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB di Provinsi Papua.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap PDRB di provinsi papua ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB di provinsi papua ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB di provinsi papua ?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB di provinsi papua ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

1. Menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK) terhadap PDRB di provinsi papua
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB di provinsi papua
3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB di provinsi papua
4. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB di provinsi papua

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memperoleh kemampuan untuk menganalisis, melatih analisa berpikir, menambah wawasan dan mengimplementasi teori dan ilmu yang di peroleh selama mengikuti pembelajaran di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dan sebagai salah
2. Bagi pembaca, di harapkan memberikan kontribusi sebagai bahan peninjauan dan evaluasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang di pengaruhi oleh Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Khusus

(DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Papua. dapat di gunakan baik sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian ke depannya yang memiliki Dana Otonomi Khusus (DOK) seperti Daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada penulisan suatu skripsi memerlukan kajian literatur yang di mana kajian itu di dapatkan dari penelitian terdahulu yang mencakup keterkaitanya dengan pertumbuhan ekonomi yang di pengaruhi oleh Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah. Baik yang di lakukan di daerah yang mendapatkan otonomi khusus seperti Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua barat, Maupun Papua. Hal ini bertujuan untuk penulis sebagai referensi yang dapat mendukung penelitian ini, maupun sebagai pembanding dengan penelitian sebelumnya dalam bentuk validitas hasil analisis yang ada, Sebagai acuan oleh penulis akan di uraikan di bawah ini. Penelitian yang di sebutkan yaitu :

(Rosita et al., 2018) Dalam penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua” penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perkembangan pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus, dan belanja modal di setiap Kabupaten Kota di Provinsi Papua serta mengevaluasi bagaimana pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus, dan belanja modal berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan 3 variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, serta Belanja Modal dan menggunakan 1 variabel independen yang merupakan Produk Domestik Regional Bruto. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel selama kurun waktu 2011-2015. dengan menggunakan model Fixed Effect. hasil nya menunjukkan bahwa belanja modal berdampak negatif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan variabel pendapatan asli daerah berdampak positif dan signifikan terhadap PDRB

(Yassirli & Sofyan Syahnur, 2018) Melakukan riset yang berjudul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Aceh” Penelitian ini menggunakan model panel dengan metode analisis Random Effect Model. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu Dana Otonomi Khusus Pendidikan dan Kesehatan sebagai variabel independennya,

sedangkan variabel dependennya ialah Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB. Hasil yang di dapatkan menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus Pendidikan dan Kesehatan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

(Sasno Mahurisal et al., 2018) Melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua”. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS Papua pada tahun 2010 – 2016 yang terdiri dari 3 variabel independen yaitu Penanaman Modal Dalam Negri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor. serta variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi yang menggunakan PDRB. Penelitian ini merupakan analisis asosiasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA, PMDN dan Ekspor secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Papua.

(Yeni Nur’aeni & Suratno, 2015) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, DOK, dan DAK Terhadap Produk Domestik Bruto di Provinsi Papua”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Analisis Regresi Berganda dengan analisa menggunakan 5 tahun data PAD, DAU, DAK, dan DOK selama 2009 hingga 2013. terdapat 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berapa banyak pengaruh antara PAD, DAU, DAK, dan DOK terhadap PDRB di provinsi Papua. Hasil pengujian dari penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

(AZ & Pebrina, 2019) Dalam Penelitian nya yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi”. Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Tenaga Kerja adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto adalah variabel dependen. Dalam penelitian ini Regresi berganda, uji

T, uji F, dan determinasi adalah alat yang digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya perizinan perekonomian menyebabkan tingkat investasi tetap rendah. Menurut uji bersama, PAD, tingkat investasi, dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan. Pada akhirnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Jambi dengan mempercepat proses perizinan dan meningkatkan PAD.

(Cahyaning, 2018) Melakukan Penelitian dengan judul *“The Effect Of Regional Original Income, General Allocation Funds, And Results Sharing Funds On Capital Expenditure Allocation With Economic Growth As Moderating Variables In East Java Regency/City Government 2013 – 2015”* Variabel yang digunakan ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independennya (X), Sedangkan Variabel dependen (Y) merupakan PDRB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mempelajari bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Modal, serta bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Modal dengan moderasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur adalah subjek penelitian ini. Studi ini mengambil sampel jenuh dari 36 kabupaten/kota di Jawa Timur. Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB dari tahun 2013 hingga 2015 digunakan sebagai sampel penelitian ini. Analisis Regresi Moderasi (MRA) digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, tetapi variabel Dana Bagi Hasil tidak. Pertumbuhan ekonomi, variabel moderasi, dapat memoderasi variabel Dana Bagi Hasil; namun, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak dapat memoderasi belanja modal.

(Ningsih & Noviaty, 2019) Melakukan riset yang berjudul *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014 – 2018”*. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara bersamaan, tetapi secara parsial, Pendapatan

Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan secara langsung pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan berasal dari data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Ekonomi dan Keuangan (KEK) dari tahun 2014 hingga 2018. Dan variabel yang di gunakan dalam penelitian ini ialah Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen nya, dengan begitu PDRB merupakan variabel dependen.

(Intan Fadilla et al., 2022) Dalam penelitian nya yang berjudul “Desentralisasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tiga hal: 1) pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019; 2) pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 hingga 2019; dan 3) pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019; 4) menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019 dipengaruhi oleh penanaman modal dalam negeri. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di 17 provinsi di wilayah timur Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019 dipengaruhi positif dan tidak signifikan oleh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan penanaman modal dalam negeri, masing-masing berpengaruh positif dan signifikan.

(Oktafia et al., 2018) Melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan untuk menentukan seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing Kabupaten/Kota dari tahun 2012 hingga

2016. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dari data panel tahun 2012–2016, yang dikuatkan dengan uji statistik, koefisien determinasi, dan uji kesesuaian model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB ADHK menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki pendapatan tertinggi dari tahun 2012 hingga 2016, dan Kota Blitar memiliki pendapatan terendah. Hasil uji simultan juga menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara keseluruhan berdampak positif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

(Rani Wulantari et al., 2021) Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003-2017”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis bagaimana dan seberapa besar PAD, DAU, dan PMDN berdampak pada PDRB Provinsi Jawa Barat dari tahun 2003 hingga 2017. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data sekunder, yang dikumpulkan dari BPS selama 15 tahun, digunakan sebagai sumber. Analisis dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Asumsi klasik (Multikolinear, Autokorelasi, Heteroskedastis, dan Normalitas) dan analisis ekonomi kemudian dilakukan dengan uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh terhadap PDRB tetapi tidak signifikan, sedangkan PAD dan DAU berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pertama perbedaan dari sisi lokasi yang diteliti, penelitian ini mengambil Provinsi Papua sebagai lokasi penelitian. Kedua, Penggunaan periode jangka tahun yang berbeda, penelitian ini menggunakan periode jangka waktu 7 tahun dari tahun 2015 – 2022. Ketiga, Perbedaan dari sisi variabel yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel dengan variabel : Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli daerah. Terakhir, Perbedaan alat analisis yang digunakan, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai total produksi barang dan jasa suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ada tiga metode untuk menghitung pendapatan nasional, menurut Keynes: metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Dari sudut pandang pengeluaran, Pendapatan Nasional dapat didefinisikan sebagai total pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di suatu Negara. Peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan lebih banyak barang bernilai ekonomi dikenal sebagai pertumbuhan PDRB.

Menurut (mankiw, 2003) Nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu disebut PDRB. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi perekonomian, yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB, seharusnya menjadi efek yang lebih besar dari kondisi ideal pertumbuhan ekonomi atau PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan menggunakan pendekatan desentralisasi fiskal, yang meliputi Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memiliki peran penting dalam meningkatkan PDRB. PAD merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Semakin besar PAD, semakin besar kemampuan daerah untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan. sehingga PAD yang besar dapat meningkatkan PDRB karena dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur, sehingga meningkatkan output nasional. DAK digunakan untuk kegiatan khusus yang tidak termasuk dalam DAU. Penggunaan DAK yang tepat dapat meningkatkan PDRB dengan membiayai kegiatan yang spesifik dan strategis, seperti proyek infrastruktur atau program sosial yang berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. DAU digunakan untuk kegiatan belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur. DAU yang efektif dapat meningkatkan PDRB dengan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga meningkatkan output nasional. PAD

merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Semakin besar PAD, semakin besar kemampuan daerah untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan. PAD yang besar dapat meningkatkan PDRB karena dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur, sehingga meningkatkan output nasional.

2.2.2 Konsep Dasar Transfer Ke Daerah

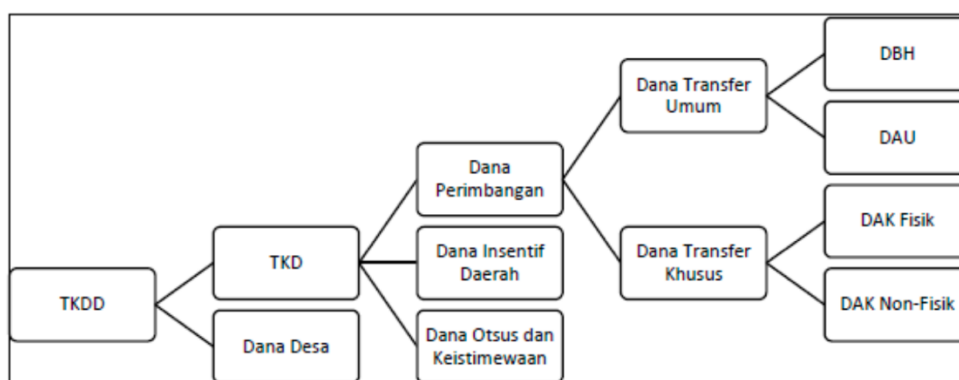
Salah satu bentuk desentralisasi fiskal adalah pengalihan wewenang dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki kaitan yang kuat dengan otonomi daerah, sehingga hal ini berkaitan juga dengan konsep dana transfer daerah.

(Prawirosetoto, 2002) TKD didefinisikan sebagai proses di mana terjadi delegasi tanggung jawab serta distribusi kekuasaan dan otoritas dalam pengambilan keputusan fiskal. Hal ini mencakup segi penerimaan, yang disebut dengan penugasan pajak, serta segi pengeluaran, yang dikenal sebagai penugasan belanja. Dengan demikian, desentralisasi fiskal bisa diinterpretasikan sebagai proses alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintahan tingkat lebih rendah atau pemerintah daerah. Distribusi ini bertujuan untuk mendukung fungsi dan tugas pemerintahan serta penyelenggaraan layanan publik. Untuk mendukung konsep ini, istilah otonomi daerah pun tercipta sebagai manifestasi dari desentralisasi fiskal di Indonesia.

Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD) adalah sarana penting dalam penerapan otonomi daerah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak serta wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Untuk mendukung otonomi tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan berupa bantuan keuangan, yang dikenal sebagai TKDD. Sesuai dengan pemahaman tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, TKDD adalah manifestasi konkret dari dana transfer yang menjadi integral dari konsep desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut Setiya & Waluyo (2021). TKDD yang merupakan bagian dari anggaran negara dalam APBN, menunjukkan adanya upaya desentralisasi fiskal

dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat sehingga berperan sebagai instrumen pendukung otonomi daerah. Dalam UU No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021, TKDD dibagi menjadi dua komponen: Transfer Ke Daerah (TKD) serta Dana Desa, di mana TKD sendiri terbagi lagi menjadi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Keistimewaan. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik.

Gambar 2. 1 Struktur Transfer Ke Daerah dan Desa



Dapat dilihat pada gambar 2.1 tersebut, dapat dijelaskan bahwa Transfer Ke Daerah (TKD) memiliki 3 komponen yaitu Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otsus dan Keistimewaan, kemudian untuk dana perimbangan terbagi menjadi dua bagian yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dalam gambar di atas bahwa Dana Alokasi Umum termasuk ke dalam Dana Transfer Umum dan untuk dana Transfer Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik.

2.2.3 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah jenis dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di wilayah-wilayah tertentu. Dana ini ditujukan untuk daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus atau memiliki potensi besar untuk pembangunan. Dana Otonomi Khusus bertujuan untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah tersebut, dengan fokus pada proyek-proyek

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana ini membantu membiayai proyek-proyek besar yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah sendiri, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang memerlukan dana besar. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan untuk mendukung program-program ekonomi seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dampak positif dari Dana Otonomi Khusus dapat terlihat dalam peningkatan aksesibilitas dan efisiensi sektor ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Namun, ada juga kemungkinan dampak negatif jika dana tidak digunakan dengan efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Papua oleh Negara Republik Indonesia melalui UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemimpin daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mana kemudian diperbarui dengan UU No. 33 Tahun 2004. serta melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008. UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Adanya Otonomi khusus memberikan kebijakan khusus dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan di Provinsi Papua. Diharapkan pembangunan yang lebih merata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa dana otonomi khusus dapat meningkatkan ekonomi yang diakibatkan dari hak pemerintah daerah dapat menentukan posisi yang mana memberikan hak kepada pemerintah daerah mengelola dan memberikan layanan publik secara langsung. Selain pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan masyarakatnya.

2.2.4 Dana Alokasi Umum

Setiap kemampuan daerah memiliki perbedaan secara teoritis, budaya, dan geografi, sehingga setiap daerah memiliki caranya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan peranan pemerintah pusat untuk memberikan dana kepada pemerintahan daerah dalam bentuk dana

perimbangan. Dana perimbangan akan di gunakan sebagai pengalokasian dana umum yang di tujukan untuk mempercepat celah pembangunan antar daerah yang lebih merata antara satu sama lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan: "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi." Selain itu, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 "menyatakan bahwa hasil perhitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan keputusan Presiden."

Tujuan dari Dana Alokasi Umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, berfungsi untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan daerah. Dengan DAU, daerah dengan kapasitas fiskal rendah dapat memperoleh dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan belanja mereka, memastikan semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan proyek pembangunan. Dana Alokasi Khusus

2.2.5 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat diberikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan tertentu, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN, Sehingga dengan kata lain Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mendukung kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan memenuhi prioritas nasional. Tujuan dari Dana Alokasi Khusus adalah untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk kegiatan khusus tersebut. DAK dialokasikan untuk investasi dalam pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan infrastruktur fisik pelayanan publik yang tahan lama.

Diharapkan bahwa layanan publik yang diberikan dalam belanja daerah akan ditingkatkan dengan menggunakan DAK.

DAK Fisik dan Non Fisik adalah dua jenis DAK. Peraturan perundang undangan yang berlaku mengatur bagaimana hal itu dilakukan. Dana ini ditransfer ke rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara dan dilaporkan dalam APBN setiap tahun. DAK digunakan untuk mengurangi ketidaksamaan dalam pelayanan publik di antara daerah dengan memprioritaskan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Jika dikelola dengan baik, fasilitas dan prasarana ini dapat memerangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi nasional. DAK harus diperoleh dan digunakan oleh daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Daerah-daerah tertentu menerima DAK dari APBN untuk mendanai proyek tertentu yang merupakan tanggung jawab daerah dan diprioritaskan oleh program nasional.

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah terhadap kegiatan pembangunan, ada harapan agar pemerintah daerah dapat secara independen mengelola keuangan untuk menutupi kebutuhan operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sumber-sumber lokal pemerintah daerah sangat penting dan tidak terpisahkan dari pengeluaran mereka. Koneksi ini membentuk satuan anggaran yang dirancang untuk membantu operasional pemerintah daerah berjalan lancar. Sama seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah pun memiliki peran serta tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan di berbagai sektor. Pendapatan asli daerah, yang merupakan pendapatan dari sumber-sumber dana lokal, mencakup:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari individu atau organisasi yang diwajibkan oleh undang-undang, yang tujuannya untuk mendanai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumbangan keuangan lainnya dari masyarakat sebagai bayaran atas pemanfaatan jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau oleh entitas-entitas milik daerah. Retribusi ini diambil dari mereka yang memanfaatkan layanan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Mardiasmo (2016), pendapatan asli daerah adalah uang yang diterima daerah dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, perusahaan milik, hasil pengelolaan kekayaan, dan sumber lain yang sah. Menurut Darmawan (2020), peningkatan PAD mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di daerah tersebut.

Pendapatan rutin dari upaya pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang mungkin untuk membiayai tugas dan kewajibannya disebut sebagai pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menemukan sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatannya. Pemerintah daerah harus mampu memikirkan kebutuhan operasional melalui otonomi daerah dan asas pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki banyak wewenang untuk menentukan suatu kebijakan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerah, hal ini jika pendapatan asli daerah di gunakan untuk usaha maupun keperluan yang berkelanjutan agar hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tujuan sesungguhnya pun akan tercapai. Menurut Pasal 10 Undang-Undang No.33 Tahun 2004, pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) dapat berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat. DAU, DBH, dan DAK terdiri dari Dana Perimbangan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Dependen dan Independen

2.3.1 Hubungan Antara Dana Otonomi Khusus dan PDRB

Dana Otonomi Khusus diamanatkan untuk mendanai proyek pembangunan di wilayah penerima dengan fokus utama pada proses akuisisi dan peningkatan infrastruktur, serta sarana dan prasarana fisik yang lain. Teori mengemukakan bahwa

Dana Otonomi Khusus yang signifikan diharapkan dapat memicu pengembangan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik di wilayah tersebut. Akibatnya, hal tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, yang ditandai dengan peningkatan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Studi empiris telah mengidentifikasi efek positif yang signifikan dari Dana Otonomi Khusus terhadap PDRB, memberikan indikasi bahwa penerimaan dana yang lebih tinggi dikorelasikan dengan peningkatan PDRB setempat. Efektivitas Dana Otonomi Khusus dalam meningkatkan PDRB dapat berfluktuasi berdasarkan seberapa efektif pemerintah daerah menggunakan dana itu, keputusan alokasi dana, dan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Dana Otonomi Khusus, pada dasarnya, diharapkan bisa mendorong kenaikan PDRB dengan menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang memadai, yang penting untuk mendukung aktivitas ekonomi wilayah penerima. Meskipun begitu, dampak yang sebenarnya dari Dana Otonomi Khusus terhadap PDRB mungkin bergantung pada keadaan khusus dan kebijakan lokal dalam menggunakan dana tersebut secara efisien dan efektif.

2.3.2 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dan PDRB

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bentuk distribusi keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersal dari APBN dan dimaksudkan untuk meratakan kemampuan finansial antar wilayah guna mendukung biaya operasional daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Idealnya, dana ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutupi pengeluaran mereka, termasuk pengeluaran modal untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan memacu ekonomi lokal. Peningkatan investasi melalui DAU diharapkan akan memimpin peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui PDRB.

Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur", Ardiani Maulidia

Oktafia, Aris Soelistyo, dan Zainal Arifin telah menemukan bahwa terdapat hubungan yang berarti dan positif antara DAU dan PDRB. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah DAU yang diterima oleh suatu pemerintah daerah, maka semakin besar pula peluang mereka untuk meningkatkan PDRB, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

2.3.3 Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus dan PDRB

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah anggaran yang diperoleh dari APBN dan ditujukan untuk daerah tertentu guna mendanai proyek-proyek khusus yang berkaitan dengan tanggung jawab daerah dan sejalan dengan agenda nasional. Tujuan utama dari DAK adalah untuk membiayai investasi dalam pembelian atau pengembangan fasilitas fisik yang memiliki masa manfaat yang lama, termasuk pembangunan infrastruktur lokal. Penggunaan DAK dalam meningkatkan infrastruktur diharapkan akan memperbaiki layanan kepada masyarakat serta menyokong kegiatan ekonomi di area terkait, yang pada gilirannya diharapkan akan mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai refleksi dari pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Berdasarkan bukti empiris, terdapat korelasi positif dan signifikan antara alokasi DAK dan pertumbuhan PDRB, yang menandakan bahwa peningkatan alokasi DAK bagi suatu daerah cenderung menyebabkan peningkatan pada PDRB daerah tersebut. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa DAK akan berkontribusi pada peningkatan PDRB dengan menyediakan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kegiatan ekonomi di daerah.

2.3.4 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk melihat kemajuan dan struktur ekonomi di sebuah area, dianggap sebagai alat ukur dalam menetapkan orientasi pembangunan yang ditunjukkan melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara selama satu tahun, yang dihasilkan tidak hanya oleh perusahaan yang dimiliki oleh warga negara tersebut tetapi juga oleh warga negara asing yang tinggal di dalam negara itu.

Dalam teori makro, dapat dianalogikan bahwa potensi penerimaan daerah berkorelasi positif dengan PDRB yang diperoleh. Oleh karena itu, peningkatan PDRB menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah akan meningkat (Saragih, 2003)

Hal ini menyatakan semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka meningkatkan PDRB, sehingga Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh Positif dalam peningkatan PDRB. hal ini berdasarkan bahwa indikator Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk implementasi dari peningkatan penghasilan individu. Pendapatan asli daerah, yang merupakan pendapatan dari sumber-sumber dana lokal, mencakup:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari individu atau organisasi yang diwajibkan oleh undang-undang, yang tujuannya untuk mendanai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

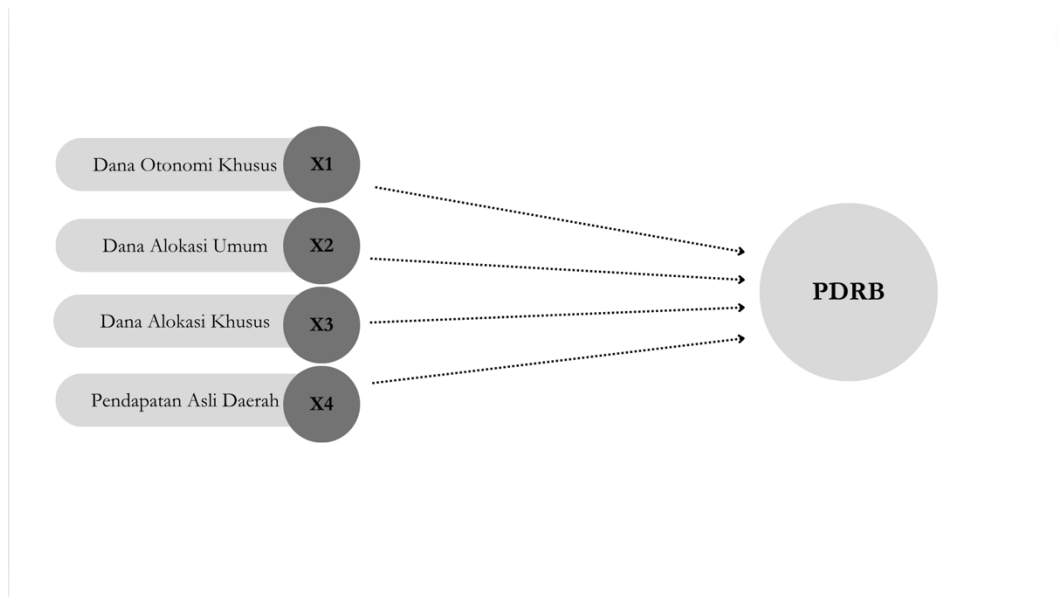
2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumbangan keuangan lainnya dari masyarakat sebagai bayaran atas pemanfaatan jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau oleh entitas-entitas milik daerah. Retribusi ini diambil dari mereka yang memanfaatkan layanan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan instrument untuk memfokuskan peneliti pada permasalahan yang dibahas pada suatu penelitian

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran



2.5. Hipotesis Penelitian

1. Dana Otonomi Khsus berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Papua
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Papua
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Papua
4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Papua

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dapat dibedakan menjadi jenis eksploratif, deskriptif, atau uji hipotesis berdasarkan tujuannya. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis uji hipotesis. Sedangkan untuk Penulisan penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan data panel yang terdiri dari kabupaten/kota di provinsi papua dengan total 29 kabupaten/kota. Data yang digunakan ialah data sekunder, yakni data yang berasal dari jejaring internet maupun buku berupa artikel terdahulu, penelitian yang berkaitan, jurnal, publikasi pemerintah maupun situs dan berita lainnya yang mendukung sebagai acuan.

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat 2 variabel yang di gunakan: variable bebas dan variable terikat. Variabel bebas, juga dikenal sebagai variabel independen, atau variabel X, adalah variabel yang dianggap sebagai pemicu munculnya variable terikat, dan variabel terikat, juga dikenal sebagai variabel terikat, adalah variabel akibat yang dibiaskan yang perubahannya mengikuti variabel bebas lainnya.

3.2.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi sebuah akibat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.2.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independen didalam penelitian ini yaitu:

3.2.3 Dana Otonomi Khusus (DOK) (X1)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus (DOK) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah. Dana DOK

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dimaksudkan untuk membiayai tugas yang telah diberikan kepada daerah dan desa.

3.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU) (X2)

Dana Alokasi Umum adalah yang didanai dari pendapatan APBN, dialokasikan untuk memfasilitasi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan memenuhi kebutuhan daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Peraturan Presiden menetapkan DAU untuk masing-masing daerah berdasarkan sejumlah faktor, termasuk gaji PNS, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB, dan belanja daerah.

3.2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendukung kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan memenuhi prioritas nasional. Kriteria umum, khusus, dan teknis digunakan untuk menetapkan DAK per daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan.

3.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X4)

Dalam Penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel independen pertama (X2), dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan dari setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Papua. Variabel ini dihitung dalam satuan rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

3.3 Metode Analisis

Studi ini melakukan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Sampel kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono., 2009)

Dalam penelitian ini, model regresi data panel yang digunakan digunakan untuk mengukur elastisitas perubahan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi data panel ini menggabungkan data cross-section dan rangkaian waktu, dan bertujuan untuk mengukur elastisitas perubahan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi data panel ini juga menggunakan model efek standar, efek tetap, dan efek kebetulan. Uji Chow, yang bertujuan untuk menentukan model mana yang paling cocok untuk digunakan, menguji model *Fixed-Effect Model (FEM)* dan *Standard Effect Model (CEM)*. Uji Hausman, di sisi lain, menguji model terbaik antara model FEM dan model REM.

3.3.1 Metode Common Effect

Metode pendekatan data panel yang dikenal sebagai *Common Effect* menggunakan asumsi bahwa intersep dan slope yang berhubungan dengan waktu dan individu dinilai tetap. Menurut (Widarjono, 2018) metode data panel ini menggabungkan *cross-section dan time series* data yang akan diestimasi kemudian menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Berikut ini adalah ringkasan model estimasi yang ditemukan dalam penelitian ini:

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRBit + \beta_2 DOKit + \beta_3 DAUit + \beta_4 DAKit + \beta_5 PADit + \varepsilon_{it}$$

3.3.2 Metode Fixed Effect (FEM)

Metode ini memberikan gambaran tentang perbedaan konstanta antar objek, dan juga menjelaskan perbedaan intersep dengan menggunakan variabel dummy. Metode model ini memungkinkan penemuan perbedaan intersep pada setiap subjek (Gujarat, 2010) asumsi pertama, *slope* akan memiliki nilai yang tetap, tetapi nilai intersep akan berubah sepanjang waktu. Dalam asumsi kedua, *slope* akan memiliki nilai yang tetap, tetapi nilai intersep akan berubah sepanjang waktu dan setiap unit. Metode *Least Square Dummy Variables (LSDV)* adalah nama lain untuk model ini (Widarjono, 2018).

3.3.3 Metode Random Effect (REM)

Salah satu istilah yang sering digunakan untuk model ini adalah model *Generalized Least Squares (GLS)*. Dalam model pendekatan ini, variabel gangguan terdiri dari dua komponen: variabel yang terjadi secara universal dan variabel yang terjadi antar

individu. Ini berbeda dengan model efek tetap karena komponen *error* setiap individu bersifat acak. Menghilangkan heteroskedastisitas adalah keuntungan dari model ini. (Widarjono, 2007).

3.4 Uji Kesesuaian Model

3.4.1 Uji Chow Test

Uji ini dilakukan untuk menentukan model yang sesuai dalam estimasi data panel, yaitu *common effect* atau *fixed effect*. Uji ini dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0: *Common effect*

Ha: *Fixed effect*

Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan F-statistik atau Chow statistik terhadap F-tabel. Jika F-statistik > F-tabel, hipotesis nol ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect* begitupun sebaliknya.

3.4.2 Uji Hausman Test

Tujuan uji ini adalah untuk menemukan model yang sesuai untuk estimasi data panel, yaitu efek tetap atau efek acak. Uji ini dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0: *Random effect*

Ha: *Fixed effect*

Dengan mengambil keputusan berdasarkan statistik Hausman dan membandingkannya dengan Chi-square. Setelah hasil menunjukkan bahwa H0 ditolak, Maka dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect model* akan digunakan.

3.4.3 Uji Signifikansi Common Effect vs Fixed Effect

Uji ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait model fixed effect yang digunakan sudah tepat dibanding model regresi *common effect* dengan melihat nilai *cross-section chi-square*. Jika nilai *cross-section chi-square* < tingkat signifikansi yang dipilih peneliti, maka *fixed effect* terpilih menjadi model yang tepat.

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam regresi, koefisien determinasi, juga dikenal sebagai *Goodnes of fit*, adalah ukuran penting yang menunjukkan seberapa besar variasi yang terjadi pada variabel dependen. Menurut pernyataan tersebut (Gujarat, 2010) Nilai R^2 yang berkisar antara $0 < R^2 < 1$ menunjukkan apakah nilai R^2 yang tinggi atau besar, Sehingga menunjukkan bahwa model tersebut masuk dalam kategori kualitas model yang baik, atau sebaliknya. Koefisien determinasi ini juga dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen secara jelas.

3.5.2 Uji t

Uji t dilakukan dengan melakukan perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, maka ketika nilai t-hitung $<$ t-kritis :

$H_0 : \beta_0 = 0$, maka antara variabel independen secara individual tidak memberi pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika t-hitug $>$ t-kritis :

$H_a : \beta_1 \neq 0$, maka variabel independen secara individu memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. (Widarjono, 2018)

3.5.3 Uji f

Hasil regresi yang signifikan dapat diketahui melalui Uji F. Pada uji ini variabel independen akan terlihat pengaruhnya terhadap variabel dependennya. Uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_0 = 0$, secara individual variabel independen tidak memberi pengaruh terhadap variabel dependen. (tidak signifikan, F hitung $<$ F tabel)

$H_a : \beta_1 \neq 0$, secara individual variabel; independen memberi pengaruh terhadap variabel dependen. (signifikan, F hitung $>$ F tabel).

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini terkhusus nya pada BAB IV akan membahas hasil penelitian mengenai Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada Tahun 2015 – 2022. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model data panel atau dengan kata lain data longitudinal yang di mana dalam penggunaan metode ini di perlukan penggunaan berdasarkan pada masa tertentu dan deretan waktu (*cross section dan time series*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan *cross section* estimasi data sebanyak 29 dengan menggunakan Kabupaten/Kota di Provinsi papua pada rentang tahun 2018 – 2022, dengan begitu penggunaan data *times series* yaitu dari data yang perolehan dalam kurun waktu 5 tahun atau pada tahun 2018 – 2022. Data – data yang di dapatkan dari website resmi Badan Pusat Statistika (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan beberapa di peroleh dari situs web resmi pemerintahan daerah, Dengan begitu data yang di gunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari variabel independen dan dependen yaitu :

1. Variabel Independen

- a. X_1 = Dana Otonomi Khusus (DOK)
- b. X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d. X_4 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Variabel Dependen

- a. Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Pengujian Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Uji regresi digunakan untuk mengevaluasi metode atau model terbaik untuk melakukan analisis data panel. Metode efek umum dan efek kebetulan akan digunakan untuk memilih model terbaik. Dalam pendekatan *common effect*, perbedaan dari segi waktu dan individu diabaikan. Dalam pendekatan *fixed effect*, perbedaan intercept untuk setiap substansi ditemukan, dengan asumsi bahwa koefisien regresi seragam antar waktu dan individu (Widarjono, 2018).

Metode saat ini akan diuji secara bertahap. Ini akan memulai dengan model efek umum, efek tetap, dan model efek kebetulan. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan hasil dari ketiga model, yang kemudian akan dipilih sebagai model terbaik untuk analisis lanjutan. Menurut (Widarjono, 2018). penggunaan model ini, yang dimulai dengan *common effect*, *fixed effect*, hingga *random effect*, dimaksudkan untuk membantu para peneliti membandingkan model analisis terbaik yang digunakan untuk penelitian ini.

Tabel 4. 1 Hasil Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model

Variabel	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	1.69E+12	0.1769	3.83E+12	0.0000	3.71E+12	0.0000
(OTSUS)	-24.20841	0.0029	-1.807266	0.1222	-1.907988	0.1025
(DAU)	4.189930	0.0061	-1.700076	0.0087	-1.515579	0.0175
(DAK)	-0.926736	0.8204	3.541090	0.0000	3.500370	0.0000
(PAD)	22.24433	0.0000	1.489063	0.0060	1.705909	0.0016
R-Squared	0.384190		0.990821		0.193695	

Variabel	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
F - Stat	35.40504		671.2477		13.63279	
Prob. F - Stat	0.000000		0.000000		0.000000	
Observation	29		29		29	

Sumber lampiran I. Hasil Estimasi CEM, FEM, dan REM

Setelah dilakukan observasi pada data yang akan diuji kemudian dilanjutkan dengan pengujian data yang di lakukan dengan menggunakan tiga model yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Hal ini di lakukan untuk menemukan model terbaik, dengan begitu penemuan model bisa di lakukan menggunakan uji chow dan uji Hausman.

4.3 Pemilihan Model Terbaik

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model FEM atau CEM lebih baik. Ini menguji signifikansi intersep α_i untuk menentukan apakah model FEM atau CEM berbeda. Hipotesis berikut digunakan:

H_0 : *Common effect* Model, Jika nilai F-statistik $> 0,05$

H_a : *Fixed effect* model, Jika nilai F - Statistic $< 0,05$

Tabel 4. 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	469.682141	(28,199)	0.0000
Cross-section Chi-square	975.786044	28	0.0000

Sumber : *E-views*

Tabel 4.2 menunjukan hasil yang telah di lakukan menggunakan alat analisis *E-VIEWS* pada tabel diatas, Telah di dapatkan bahwa nilai pada F-statistik sebesar 0,0000

dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% (0,05) maka dapat di simpulkan bahwa F-statistik < 5% (0,05) sehingga menolak H0 dan menerima Ha sehingga di dapatkan *Fixed Effect Model* sebagai model akhir.

4.3.2 Uji Hausman

Dalam analisis regresi data panel, uji Hausman adalah teknik statistik yang digunakan untuk memilih model *Fixed Effect (FEM)* atau *Random Effect (REM)*. Dengan hipotesis yaitu :

H0: jika nilai pada *probability cross section random* > 0,05 maka menggunakan *random effect model*

Ha: jika nilai pada *probability cross section random* < 0,05 maka tetap menggunakan *fixed effect model*.

Tabel 4. 3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.897794	4	0.0001

Sumber : *E-views*

Hasil uji Hausman telah di lakukan dengan menggunakan alat analisis E-Views pada tabel diatas, Telah di dapatkan bahwa nilai pada *probability cross section random* sebesar 0,0001 dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% (0,05) maka dapat di simpulkan bahwa *probability cross section random* < 10% (0,05) sehingga menolak H0 dan menerima Ha sehingga didapatkan *Fixed Effect Model* sebagai model tetap yang digunakan dan menjadi *best model* dan tidak diperlukanya melakukan uji dengan pendekatan *Langrange Multiplier (LM)*.

4.4 Model Terbaik

4.4.1 Fixed Effect Model

Keputusan yang diperoleh dari uji chow dan hausman adalah bahwa model *fixed effect model* adalah yang terbaik untuk penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa model ini dapat menjelaskan.

Tabel 4. 4 Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.83E+12	4.51E+11	8.485635	0.0000
(OTSUS)	-1.807266	1.164468	-1.552010	0.1222
(DAU)	-1.700076	0.641229	-2.651277	0.0087
(DAK)	3.541090	0.620749	5.704543	0.0000
(PAD)	1.489063	0.536094	2.777616	0.0060
F-statistic	671.2477	R-squared		0.990821
Prob(F-statistic)	0.000000	Adjusted R-squared		0.989344

Sumber : *E-views*

Persamaan Regresi

$$Y = 3.83E+12 - 1.807266 (X1) - 1.700076 (X2) + 3.541090 (X3) + 1.489063 (X4) + e$$

Keterangan:

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

β_0 = Koefisien Intersept

β_1 = Koefisien pengaruh Otonomi Khusus (DOK)

β_2 = Koefisien pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

β_3 = Koefisien pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)

β_4 = Koefisien pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.5 Pengujian Statistik

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Kekuatan kepastian yang dijelaskan pada variabel independen dibandingkan dengan variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2). Semua orang tahu bahwa nilai koefisien determinasi harus nol dan satu, jadi apabila nilainya lebih kecil atau nol, maka ketepatan pada variabel independen kurang memahami variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilainya lebih besar atau satu, maka ketepatan pada variabel independen cukup memahami variabel dependen.

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa dana otonomi khusus, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus di Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2015-2022 yang diuji melalui model fixed effect model menghasilkan R-squared sebesar 0.990821 atau 99,08% yang mana dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan model yang ada, sedangkan 0,92% dapat dijelaskan di luar model penelitian lain.

4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F, juga disebut uji simultan, adalah uji statistik yang menentukan apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara keseluruhan. Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. F hitung yang diperoleh melalui ($\alpha; k-1; n-k$) dan F tabel yang diperoleh hasilnya menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan rumus FINV ($\alpha; k-1; n-k$) dengan alpha (α) senilai 0.05, total observasi (n) sebanyak 232 sampel dan total variabel dependen dan independen (k) sebanyak 5 variabel. Setelah diuji dan diperoleh hasil dari $\alpha = 0.05$ maka F tabel sebesar 2.41141384.

Maka dari itu hasil F-tabel akan dibandingkan dengan F-hitung yaitu bahwa F-hitung sebesar $671.2477 > F\text{-tabel sebesar } 2.41141384$ maka dapat disimpulkan menolak H_0 dan menerima H_a sehingga variabel (Dana otonomi khusus, PAD, DAU, DAK) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (PDRB) pada derajat keyakinan (*significance level*) 5%. Dan pada nilai probabilitas F-statistik sebesar

$0.0000 < 0.05$ ($\alpha = 0.05$) lebih kecil dari *significance level* 5%. Hal ini berarti variabel independen pada penelitian memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan pada derajat keyakinan 5%.

4.5.3 Uji t

Uji t, juga disebut sebagai uji *t-test*, adalah teknik statistik untuk membandingkan dua populasi atau sampel dengan rata-rata atau mean. Dengan menggunakan t-hitung dan t-tabel, uji t bertujuan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki pengaruh terhadap variabel independen ketika nilai probabilitas t-hitung lebih besar daripada t-tabel, dan sebaliknya, ketika nilai probabilitas t-hitung lebih rendah daripada t-tabel, maka antara variabel independen dan variabel dependen tidak ada pengaruh. Dengan menggunakan Microsoft Excel, rumus *TINV (probabilities, degree freedom)* digunakan untuk mendapatkan t-tabel, yang berjumlah 2.597661. Untuk mengetahui bahwa hasil dari variabel tersebut signifikan atau tidak signifikan diakukannya uji t dengan $\alpha = 0.05$ bahwa keputusan dari hasil tersebut jika nilai probabilitas uji t > 0.05 maka menerima H_0 dan menolak H_a , sebaliknya apabila nilai probabilitas uji t < 0.05 maka menolak H_0 dan menerima H_a dan hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 5 Uji t-statistika ($\alpha = 5\%$)

Variabel	Coefficient	t- statistik	t-tabel	prob.	keterangan
(OTSUS)	-1.807266	-1.552010	2.597661	0.1222	Tidak Signifikan
(DAU)	-1.700076	-2.651277	2.597661	0.0087	Signifikan
(DAK)	3.541090	5.704543	2.597661	0.0000	Signifikan
(PAD)	1.489063	2.777616	2.597661	0.0060	Signifikan

C	3.83E+12	8.485635	2.597661	0.0000
----------	----------	----------	----------	--------

Sumber : *E-views*

1. Variabel Otonomi Khusus

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa probabilitas variabel otonomi khusus sebesar $0,1222 > 5\%$ sehingga diperoleh hasil uji tersebut bahwa menerima H_0 dan menolak H_a maka dapat disimpulkan variabel independen dana alokasi umum dan variabel dependen PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

2. Variabel Dana Alokasi Umum

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa probabilitas variabel dana alokasi umum sebesar $0,0087 < 5\%$ sehingga hasil yang diperoleh bahwa menolak H_0 dan menerima H_a dan kesimpulannya bahwa variabel independen dana alokasi umum dan variabel dependen PDRB memiliki pengaruh yang signifikan.

3. Variabel Dana Alokasi Khusus

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa probabilitas variabel dana alokasi khusus sebesar $0,0000 < 5\%$ sehingga diperoleh hasil uji tersebut bahwa menerima H_0 dan menolak H_a maka dapat disimpulkan variabel independen dana alokasi khusus dan variabel dependen PDRB memiliki pengaruh yang signifikan.

4. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa probabilitas variabel pendapatan asli daerah sebesar $0,0060 < 5\%$ sehingga hasil yang diperoleh bahwa menolak H_0 dan menerima H_a dan kesimpulannya bahwa variabel independen pendapatan asli daerah dan variabel dependen memiliki pengaruh yang signifikan.

4.6 Interpretasi dan Pembahasan

4.6.1 Variabel Dana Otonomi Khusus

Dana Alokasi Khusus Merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu,

dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Daerah tertentu dimaksudkan sebagai daerah yang memiliki kebutuhan khusus. Adanya Otonomi khusus memberikan kebijakan khusus dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan di provinsi Papua. Diharapkan pembangunan yang lebih merata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa dana otonomi khusus dapat meningkatkan ekonomi yang diakibatkan dari hak pemerintah daerah dapat menentukan posisi yang mana memberikan hak kepada pemerintah daerah mengelola dan memberikan layanan publik secara langsung. Selain pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Adapun hasil koefisien yang didapatkan sebesar -1.807266. berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan mampu membuktikan bahwa Dana Otonomi Khusus (DOK) menghasilkan nilai negatif terhadap PDRB di Kab/Kota di provinsi Papua Tahun 2015-2022. Penjelasan Hal ini sejalan dengan penelitian (Kambu & Samsubar, 2004) dan (Juliarini & Hatmoko, 2020). (Juliarini & Hatmoko, 2020) Menyatakan bahwa Dana Otsus memiliki dampak yang sangat kecil terhadap PDRB di Provinsi Papua karena faktor-faktor seperti geografi, demografi, sosiologi, dan kebijakan pemerintah setempat. Bambu (2004) menemukan bahwa dana Otsus yang diberikan pada tahun 2002 dan 2003 tidak didistribusikan secara merata antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Untuk memastikan pembangunan tidak terhambat dan merata di seluruh Papua, pembagian dana Otsus untuk Kabupaten/Kota harus lebih besar daripada Pemerintah Provinsi, dengan 40% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan 60% untuk Pemerintah Provinsi. Ini karena fokus pelayanan pemerintahan seperti pendidikan dan kesehatan akan lebih efektif jika dialokasikan dengan lebih besar.

4.6.2 Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Setiap kemampuan daerah memiliki perbedaan secara teoritis, budaya, dan geografi, sehingga setiap daerah memiliki caranya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan peranan pemerintah pusat untuk memberikan dana kepada pemerintahan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan akan digunakan sebagai pengalokasian dana umum

yang di tujukan untuk mempercepat celah pembangunan antar daerah yang lebih merata antara satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari pengolahan data yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) menghasilkan nilai negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Kab/Kota di provinsi Papua pada tahun 2015-2022. Adapun hasil koefisien yang di dapatkan sebesar -1.700076. dapat di simpulkan apabila terjadi kenaikan DAU sebesar 1 rupiah akan menurunkan PDRB sebesar 1.700076 rupiah. Hal ini bisa terjadi yang diakibatkan penggunaan Dana Alokasi Umum yang di gunakan untuk belanja modal mengalami penurunan efektivitas dan efisiensi. biasanya penggunaan dana tersebut di gunakan untuk membayar utang daerah, serta pembelanjaan yang bersifat tidak produktif. hal ini sejalan dengan penelitian sebelum nya. (Noviasari & Suprpto, 2017) yang di mana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap PDRB di provinsi Jawa Timur. Hal ini bisa terjadi yang di akibatkan oleh penggunaan Dana Alokasi Umum yang di gunakan untuk belanja modal mengalami penurunan efektivitas dan efisiensi, akibatnya hal ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PDRB atau PDRB mengalami penurunan yang signifikan.

4.6.3 Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan mendukung kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan memenuhi prioritas nasional. Tujuan dari Dana Alokasi Khusus adalah untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk kegiatan khusus tersebut. DAK dialokasikan untuk investasi dalam pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan infrastruktur fisik pelayanan publik yang tahan lama. Diharapkan bahwa layanan publik yang diberikan dalam belanja daerah akan ditingkatkan dengan menggunakan DAK.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari pengolahan data yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hasil Positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab/Kota di provinsi

Papua pada tahun 2015 – 2022. Adapun hasil koefisien yang di dapatkan sebesar 3.541090. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelum nya (Oktafia et al., 2018) yang menyatakan dalam penelitian bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap PDRB, apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan PDRB. Hal Ini karena DAK dialokasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, seperti membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana yang lebih besar. Dapat disimpulkan bahwa jumlah DAK yang diterima pemerintah daerah sebanding dengan kualitas pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut.

4.6.4 Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(Mardiasmo, 2019) pendapatan asli daerah adalah uang yang diterima daerah dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, perusahaan milik, hasil pengelolaan kekayaan, dan sumber lain yang sah. Menurut (Darmawan, 2020), peningkatan PAD mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di daerah tersebut.

Pendapatan rutin dari upaya pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang mungkin untuk membiayai tugas dan kewajibannya disebut sebagai pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menemukan sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatannya. Pemerintah daerah harus mampu memikirkan kebutuhan operasional melalui otonomi daerah dan asas pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki banyak wewenang untuk menentukan suatu kebijakan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerah, hal ini jika pendapatan asli daerah di gunakan untuk usaha maupun keperluan yang berkelanjutan

Berdasarkan hasil yang di dapatkan dari pengolahan data yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab/Kota di provinsi Papua pada tahun 2015 – 2022. Adapun hasil koefisien yang di dapatkan sebesar 1.489063. Hal ini dapat terjadi karena Pendapatan Asli Daerah Sebagai acuan dasar yang berasal dari pajak daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan PAD secara otomatis telah terjadinya peningkatan pendapatan Masyarakat, Peningkatan lapangan

kerja, penurunan pengangguran, peningkatan SDM, serta peningkatan pembangunan infrastruktur.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelum nya (Yeni Nur'aeni & Suratno, 2015) yang menyatakan dalam penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB, maka dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan memberikan peningkatan pada PDRB.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengacu kepada hasil estimasi, pembahasan, dan menganalisis yang berjudul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB Di Provinsi Papua Pada Tahun 2015 – 2022” berdasarkan hasil dari pengolahan dan pengujian pada data yang telah di lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Didapatkan nilai koefisien sebesar -1.807266. sehingga dapat di simpulkan apabila terjadi kenaikan Dana Otonomi Khusus (DOK) sebesar 1 rupiah akan menurunkan PDRB sebesar 1.807266. Hal Ini menunjukkan bahwa PDRB di kabupaten/kota di Provinsi Papua tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Otonomi Khusus. Hal ini bisa terjadi karena karena faktor-faktor seperti geografi, demografi, sosiologi, dan kebijakan pemerintah setempat, selain itu penggunaan Dana otonomi khusus yang kurang optimal. Sehingga penelitian ini menyoroti pentingnya mengoptimalkan distribusi dana Otonomi Khusus agar dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembangunan di Provinsi Papua.
2. Hasil koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -1.700076. Disimpulkan bahwa apabila terjadi kenaikan DAU sebesar 1 rupiah maka akan menurunkan PDRB sebesar 1.700076 rupiah. Sehingga DAU berpengaruh negatif terhadap PDRB di Kab/Kota di provinsi Papua. bisa terjadi yang diakibatkan penggunaan Dana Alokasi Umum yang di gunakan untuk belanja modal mengalami penurunan efektivitas dan efisiensi. biasanya penggunaan dana tersebut di gunakan untuk membayar utang daerah, serta pembelanjaan yang bersifat tidak produktif.
3. Didapatkan nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 3.541090, Dapat di simpulkan apabila terjadi kenaikan DAK sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 3.541090 rupiah. Hal Ini karena DAK dialokasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, seperti membiayai pembangunan sarana dan prasarana, Dengan begitu

jumlah DAK yang diterima pemerintah daerah sebanding dengan kualitas pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut.

4. Didapatkan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.489063, Dapat di simpulkan apabila terjadi kenaikan PAD sebesar 1 rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 1.489063. sehingga PAD berpengaruh positif terhadap PDRB di Kab/Kota di provinsi Papua. Hal ini dapat terjadi akibat adanya peningkatan Masyarakat, Peningkatan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, peningkatan SDM, serta meningkatnya pendapatan perkapita dengan begitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai acuan dasar karena berasal dari Pajak daerah tersebut dan lain sebagainya.

5.2. Implikasi

Dalam Penelitian yang telah di lakukan berdasarkan dari analisis data dan pembahasan diatas dengan judul “Pengaruh Dana Otonomi Khusus (DOK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB Di Provinsi Papua Pada Tahun 2018 – 2022”, ada beberapa hal yang dapat diimplikasikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. rekomendasi yang dapat di berikan adalah Pemerintah yang menerima dana otsus yang besar harus terus berusaha untuk meningkatkan ekonomi daerahnya, termasuk meningkatkan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan, dan perundang-undangan.
2. Pemerintah daerah harus lebih bijaksana dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di provinsi Papua agar menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini merujuk pada kemungkinan ketidakefisienan dalam pemanfaatan dana tersebut. Pengelolaan yang buruk atau alokasi yang tidak optimal dapat menghambat perkembangan ekonomi daerah. sehingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi ulang dan melakukan restrukturisasi Dana Alokasi Umum. Walaupun DAU

dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan daerah, jika dana tersebut tidak digunakan secara efektif atau tepat sasaran, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa negatif. Selain itu, Provinsi Papua memiliki kondisi sosial-ekonomi yang khas, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi dan infrastruktur yang kurang memadai. Dana yang dialokasikan mungkin tidak cukup untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, sehingga meskipun ada alokasi dana, pertumbuhan ekonomi tetap terhambat.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh dalam peningkatan PDRB di provinsi Papua. sehingga kebijakan yang dapat di ambil oleh pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran Dana Alokasi Khusus yang di tujukan untuk pembangunan infrastruktur, SDM, Pendidikan dan Kesehatan.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh dalam meningkatkan PDRB sehingga setiap kabupaten/kota dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) agar pemerintah daerah bisa lebih maksimal dalam peningkatan masyarakat, Peningkatan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, peningkatan SDM, serta meningkatnya pendapatan perkapita. pendapatan atau peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- AZ, S. M., & Pebrina, S. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(1), 36–43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.54>
- Cahyaning, S. (2018). *The Effect Of Regional Original Income, General Allocation Funds, And Result Sharing Funds On Capital Expenditure Allocation With Economic Growth As Moderating Variables In East Java Regency/City Government 2013-2015*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1), 20–38. <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Darmawan, H. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kediri Periode 2001 - 2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 71–85.
- Gujarat, D. N. (2010). *Dasar - Dasar Ekonometrika* (E. Mardanugraha, S. Wardani, & C. Mangunsong, Eds.). Salemba Empat.
- Intan Fadilla, S., Kencana, H. T., Retnowati, D., Dwi Purnomo, S., Winarto, H., & Adhitya, B. (2022). Desentralisasi Fiskal Dan Investasu Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia. 917–930.
- Juliarini, A., & Hatmoko, A. W. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 335.
- Kambu, H. W., & Samsubar, Saleh. (2004). Analisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Universitas Gajah Mada.
- Kuncoro. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- mankiw, G. N. (2003). *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Mankiw, N. G. (2007). *Macroeconomics* (S. Penerjemah : Fitria Liza & S. Imam Nurmawan, Eds.). Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. ANDI.
- Ningsih, E. K., & Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 91–95. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.67>
- Noviasari, A. S. A., & Suprpto, E. (2017). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmiah*.
- Oktafia, A. M., Soelistyo, A., & Arifin, Z. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 53–62.
- Pemendagri, I. (2009). *Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 39 T*.
- Prawirosetoto, Y. (2002). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012. *Jejak* 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Rani Wulantari, Haviz, M., & Mafruhah, A. Y. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003-2017. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.62>

- Rosita, A., Anwar, D., Faisal Abdullah, M., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 1–13.
- Saragih, J. Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia.
- Sasno Mahurisal, Moh. Amin, & dan Junaidi. (2018). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan ekonomi Papua. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang, 7.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Todaro, M. P. , & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi Edisi Sebelas (11th ed.). Erlangga.
- Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis (2nd ed.). Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Edisi 5).
- Yassirli, & Sofyan Syahnur. (2018). Pengaruh Dana Otsus Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 4, 495–505.
- Yeni Nur'aeni, & Suratno. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 2, 32–42.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rupiah*

Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB ADHK Tanpa Tambang	PDRB ADHK (dengan Tambang)	Otonomi Khusus	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
Kabupate Merauke	2015	7.535.267. 610.000	7.662.490. 770.000	102.513.47 2.000	145.894.884. 857,7400	1.215.753 .740.000
Kabupate Merauke	2016	8.111.839. 290.000	8.249.367. 500.000	102.513.47 2.000	166.441.748. 858,6100	1.232.993 .695.000
Kabupate Merauke	2017	8.716.004. 130.000	8.864.809. 700.000	102.513.47 2.000	160.522.699. 713,3500	1.232.993 .695.000
Kabupate Merauke	2018	9.424.670. 470.000	9.583.662. 400.000	102.513.47 2.000	140.110.000. 000,0000	1.220.130 .000.000
Kabupate Merauke	2019	10.137.497 .620.000	10.307.373 .250.000	75.504.679 .562	134.245.000. 000,0000	1.248.030 .000.000
Kabupate Merauke	2020	10.035.448 .350.000	10.209.567 .470.000	48.495.887 .123	128.380.000. 000,0000	1.136.920 .000.000
Kabupate Merauke	2021	10.176.739 .540.000	10.363.473 .670.000	94.157.943 .562	141.760.000. 000,0000	1.121.070 .000.000
Kabupate Merauke	2022	10.644.982 .190.000	10.838.514 .420.000	139.820.00 0.000	191.830.000. 000,0000	1.122.850 .000.000
Kota Jayapura	2015	18.098.530 .410.000	18.166.639 .650.000	95.555.051 .000	152.631.134. 983,3300	641.368.3 19.000
Kota Jayapura	2016	19.406.907 .790.000	19.480.403 .500.000	95.555.051 .000	164.831.615. 677,7400	643.364.1 88.000
Kota Jayapura	2017	20.574.912 .310.000	20.652.968 .800.000	95.555.051 .000	176.666.250. 172,7800	643.364.1 88.000

Kota Jayapura	2018	21.694.717 .730.000	21.778.321 .450.000	95.555.051 .000	243.860.000. 000,0000	634.300.0 00.000
Kota Jayapura	2019	22.769.655 .620.000	22.857.302 .290.000	63.711.036 .050	235.150.000. 000,0000	660.190.0 00.000
Kota Jayapura	2020	22.027.357 .740.000	22.117.777 .310.000	31.867.021 .099	173.770.000. 000,0000	592.100.0 00.000
Kota Jayapura	2021	22.727.603 .310.000	22.819.087 .700.000	74.778.510 .550	250.670.000. 000,0000	580.490.0 00.000
Kota Jayapura	2022	23.611.085 .810.000	23.703.009 .550.000	117.690.00 0.000	300.960.000. 000,0000	580.490.0 00.000
Kabupaten Jayapura	2015	7.268.623. 460.000	7.445.581. 600.000	103.583.97 2.000	74.130.385.4 58,9200	621.019.5 50.000
Kabupaten Jayapura	2016	7.903.879. 650.000	8.081.232. 800.000	103.583.97 2.000	87.394.171.9 37,4600	690.129.4 17.000
Kabupaten Jayapura	2017	8.468.652. 140.000	8.647.527. 100.000	103.583.97 2.000	96.961.324.5 36,6300	690.559.6 42.000
Kabupaten Jayapura	2018	9.128.705. 010.000	9.312.179. 380.000	103.583.97 2.000	88.770.000.0 00,0000	685.570.0 00.000
Kabupaten Jayapura	2019	9.790.519. 740.000	9.978.844. 010.000	74.828.717 .946	103.440.000. 000,0000	706.490.0 00.000
Kabupaten Jayapura	2020	9.534.706. 080.000	9.729.656. 190.000	46.073.463 .891	96.810.000.0 00,0000	637.730.0 00.000
Kabupaten Jayapura	2021	10.004.295 .690.000	10.206.015 .890.000	81.621.731 .946	125.480.000. 000,0000	628.450.0 00.000
Kabupaten Jayapura	2022	10.382.966 .790.000	10.587.414 .240.000	117.170.00 0.000	150.140.000. 000,0000	629.530.0 00.000
Kabupaten Sarmi	2015	1.406.009. 780.000	1.426.598. 430.000	98.877.880 .000	6.426.535.12 9,0000	699.065.9 55.000
Kabupaten Sarmi	2016	1.499.786. 660.000	1.522.294. 200.000	98.877.880 .000	28.410.836.6 73,8000	716.924.7 41.000

Kabupaten Sarmi	2017	1.604.059. 140.000	1.630.359. 200.000	98.877.880 .000	5.092.657.36 4,7500	718.032.3 74.000
Kabupaten Sarmi	2018	1.706.119. 190.000	1.732.119. 400.000	98.877.880 .000	13.710.000.0 00,0000	711.730.0 00.000
Kabupaten Sarmi	2019	1.807.300. 920.000	1.833.626. 130.000	71.641.429 .796	15.790.000.0 00,0000	726.450.0 00.000
Kabupaten Sarmi	2020	1.807.429. 980.000	1.834.110. 580.000	44.404.979 .591	17.390.000.0 00,0000	643.300.0 00.000
Kabupaten Sarmi	2021	1.837.968. 530.000	1.864.958. 190.000	80.382.489 .796	14.230.000.0 00,0000	631.560.0 00.000
Kabupaten Sarmi	2022	1.877.604. 430.000	1.905.088. 930.000	116.360.00 0.000	95.100.000.0 00,0000	631.560.0 00.000
Kabupaten Mimika	2015	7.704.441. 900.000	57.214.520 .370.000	100.956.19 5.000	332.182.531. 621,1300	621.198.3 53.000
Kabupaten Mimika	2016	8.293.468. 150.000	64.942.379 .700.000	100.956.19 5.000	305.372.673. 107,8900	621.198.3 53.000
Kabupaten Mimika	2017	8.738.564. 760.000	67.336.613 .800.000	100.956.19 5.000	366.471.582. 445,5200	621.198.3 53.000
Kabupaten Mimika	2018	9.163.346. 080.000	74.249.680 .200.000	100.956.19 5.000	342.125.000. 000,0000	599.825.3 86.000
Kabupaten Mimika	2019	9.621.795. 110.000	45.651.025 .340.000	66.133.015 .779	326.792.500. 000,0000	629.450.0 00.000
Kabupaten Mimika	2020	9.160.425. 000.000	50.871.587 .740.000	31.309.836 .558	311.460.000. 000,0000	562.080.0 00.000
Kabupaten Mimika	2021	9.457.682. 810.000	69.618.912 .790.000	83.594.918 .279	891.290.000. 000,0000	550.840.0 00.000
Kabupaten Mimika	2022	9.827.121. 100.000	80.277.603 .570.000	135.880.00 0.000	1.089.110.00 0.000,0000	550.840.0 00.000
Kabupaten Keerom	2015	1.639.939. 290.000	1.658.201. 910.000	94.899.955 .000	12.476.128.5 72,0000	522.597.2 71.000

Kabupaten Keerom	2016	1.735.073. 290.000	1.754.130. 400.000	94.899.955 .000	63.814.379.2 09,7600	555.013.1 94.000
Kabupaten Keerom	2017	1.819.341. 240.000	1.839.174. 400.000	94.899.955 .000	12.683.764.7 57,0000	555.013.1 94.000
Kabupaten Keerom	2018	1.895.648. 640.000	1.916.264. 230.000	94.899.955 .000	19.490.000.0 00,0000	545.710.0 00.000
Kabupaten Keerom	2019	1.969.616. 180.000	1.991.014. 250.000	61.957.504 .253	26.380.000.0 00,0000	557.310.0 00.000
Kabupaten Keerom	2020	1.971.455. 050.000	1.993.545. 590.000	29.015.053 .505	19.900.000.0 00,0000	501.430.0 00.000
Kabupaten Keerom	2021	2.024.623. 510.000	2.047.496. 520.000	68.822.526 .753	22.230.000.0 00,0000	492.130.0 00.000
Kabupaten Keerom	2022	2.083.285. 580.000	2.106.466. 380.000	108.630.00 0.000	12.470.000.0 00,0000	492.220.0 00.000
Kabupaten Boven Digoel	2015	2.825.437. 950.000	2.862.378. 700.000	100.456.54 5.000	23.216.047.7 99,7000	783.185.7 08.000
Kabupaten Boven Digoel	2016	2.959.299. 310.000	2.998.124. 000.000	100.456.54 5.000	27.580.049.1 09,1200	838.785.7 02.000
Kabupaten Boven Digoel	2017	3.079.356. 400.000	3.120.158. 600.000	100.456.54 5.000	34.128.578.8 20,2000	839.081.3 05.000
Kabupaten Boven Digoel	2018	3.179.048. 580.000	3.221.865. 950.000	100.456.54 5.000	33.670.000.0 00,0000	831.710.0 00.000
Kabupaten Boven Digoel	2019	3.230.489. 430.000	3.275.505. 740.000	80.219.271 .637	31.945.000.0 00,0000	848.900.0 00.000
Kabupaten Boven Digoel	2020	3.144.888. 020.000	3.190.498. 300.000	59.981.998 .273	30.220.000.0 00,0000	761.280.0 00.000
Kabupaten Boven Digoel	2021	3.168.371. 340.000	3.214.086. 520.000	94.480.999 .137	28.430.000.0 00,0000	746.660.0 00.000
Kabupaten Boven Digoel	2022	3.218.170. 370.000	3.264.014. 850.000	128.980.00 0.000	25.830.000.0 00,0000	746.660.0 00.000

Kabupaten Nabire	2015	4.491.578. 100.000	5.946.203. 330.000	100.989.29 7.000	19.580.796.3 40,0000	675.594.6 12.000
Kabupaten Nabire	2016	4.852.384. 400.000	6.350.070. 500.000	100.989.29 7.000	51.434.040.4 65,0000	709.592.5 53.000
Kabupaten Nabire	2017	5.198.478. 030.000	6.737.170. 900.000	100.989.29 7.000	47.298.707.0 17,0000	711.301.3 68.000
Kabupaten Nabire	2018	5.564.070. 840.000	7.124.941. 070.000	100.989.29 7.000	43.876.000.0 00,0000	709.280.0 00.000
Kabupaten Nabire	2019	5.877.225. 000.000	7.457.289. 080.000	73.373.135 .121	78.801.000.0 00,0000	729.140.0 00.000
Kabupaten Nabire	2020	5.758.024. 450.000	7.355.883. 800.000	45.756.973 .242	69.850.000.0 00,0000	669.920.0 00.000
Kabupaten Nabire	2021	6.069.398. 790.000	7.684.561. 970.000	86.993.486 .621	87.800.000.0 00,0000	661.800.0 00.000
Kabupaten Nabire	2022	6.278.516. 100.000	7.882.335. 400.000	128.230.00 0.000	38.980.000.0 00,0000	662.360.0 00.000
Kabupate Biak Numfor	2015	3.336.779. 270.000	3.364.870. 540.000	100.104.19 3.000	67.647.949.0 50,0000	550.027.9 39.000
Kabupate Biak Numfor	2016	3.469.280. 320.000	3.501.595. 100.000	100.104.19 3.000	22.928.633.0 69,7900	599.365.7 87.000
Kabupate Biak Numfor	2017	3.311.294. 710.000	3.341.438. 600.000	100.104.19 3.000	13.509.836.4 32,2900	599.365.7 87.000
Kabupate Biak Numfor	2018	3.324.971. 700.000	3.355.449. 630.000	100.104.19 3.000	16.300.000.0 00,0000	590.680.0 00.000
Kabupate Biak Numfor	2019	3.397.076. 470.000	3.429.603. 630.000	66.181.414 .784	111.840.000. 000,0000	608.690.0 00.000
Kabupate Biak Numfor	2020	3.225.005. 630.000	3.255.905. 790.000	32.258.636 .567	98.440.000.0 00,0000	540.020.0 00.000
Kabupate Biak Numfor	2021	3.304.917. 480.000	3.336.568. 500.000	78.109.318 .284	65.840.000.0 00,0000	532.360.0 00.000

Kabupate Biak Numfor	2022	3.470.632. 450.000	3.502.665. 220.000	123.960.00 0.000	95.180.000.0 00,0000	532.360.0 00.000
kabupaten Mappi	2015	1.454.308. 740.000	1.459.655. 380.000	104.091.29 0.000	16.492.934.6 69,0000	781.105.4 20.000
kabupaten Mappi	2016	1.555.258. 660.000	1.560.701. 100.000	104.091.29 0.000	21.495.206.4 01,0000	788.251.8 05.000
kabupaten Mappi	2017	1.664.837. 610.000	1.670.468. 200.000	104.091.29 0.000	28.693.433.6 84,8100	788.251.8 05.000
kabupaten Mappi	2018	1.770.131. 610.000	1.775.916. 770.000	104.091.29 0.000	35.800.000.0 00,0000	781.330.0 00.000
kabupaten Mappi	2019	1.878.486. 610.000	1.884.399. 210.000	82.888.533 .716	52.120.000.0 00,0000	799.170.0 00.000
kabupaten Mappi	2020	1.854.725. 930.000	1.860.729. 260.000	61.685.777 .431	32.640.000.0 00,0000	706.980.0 00.000
kabupaten Mappi	2021	1.896.230. 710.000	1.902.235. 850.000	102.432.88 8.716	20.310.000.0 00,0000	697.310.0 00.000
kabupaten Mappi	2022	1.991.114. 240.000	1.997.291. 580.000	143.180.00 0.000	65.000.000.0 00,0000	697.790.0 00.000
Kabupaten Asmat	2015	1.221.840. 210.000	1.222.075. 650.000	105.686.14 7.000	51.564.628.4 44,0000	869.676.6 87.000
Kabupaten Asmat	2016	1.297.333. 580.000	1.297.558. 700.000	105.686.14 7.000	71.346.686.8 57,9400	899.435.5 81.000
Kabupaten Asmat	2017	1.373.287. 550.000	1.373.502. 800.000	105.686.14 7.000	38.346.723.3 76,1600	902.981.1 87.000
Kabupaten Asmat	2018	1.452.598. 680.000	1.452.804. 520.000	105.686.14 7.000	30.490.000.0 00,0000	895.260.0 00.000
Kabupaten Asmat	2019	1.522.127. 170.000	1.522.325. 640.000	83.812.754 .265	31.185.000.0 00,0000	914.870.0 00.000
Kabupaten Asmat	2020	1.531.158. 350.000	1.531.359. 720.000	61.939.361 .529	31.880.000.0 00,0000	826.840.0 00.000

Kabupaten Asmat	2021	1.563.439. 530.000	1.563.644. 460.000	106.794.68 0.765	27.300.000.0 00,0000	815.870.0 00.000
Kabupaten Asmat	2022	1.641.412. 480.000	1.641.625. 700.000	151.650.00 0.000	76.260.000.0 00,0000	815.870.0 00.000
Kabupaten Kepulauan Yapen	2015	2.387.025. 700.000	2.400.151. 100.000	94.656.505 .000	44.398.034.0 99,1200	490.124.0 80.000
Kabupaten Kepulauan Yapen	2016	2.515.901. 350.000	2.530.004. 700.000	94.656.505 .000	57.427.069.5 25,8600	528.159.1 37.000
Kabupaten Kepulauan Yapen	2017	2.632.258. 890.000	2.647.455. 700.000	94.656.505 .000	42.340.844.9 50,3700	529.188.8 85.000
Kabupaten Kepulauan Yapen	2018	2.751.842. 570.000	2.767.986. 400.000	94.656.505 .000	38.730.000.0 00,0000	547.270.0 00.000
Kabupaten Kepulauan Yapen	2019	2.881.833. 690.000	2.898.818. 620.000	70.324.640 .115	46.070.000.0 00,0000	567.670.0 00.000
Kabupaten Kepulauan Yapen	2020	2.750.804. 290.000	2.767.493. 050.000	45.992.775 .230	40.760.000.0 00,0000	521.100.0 00.000
Kabupaten Kepulauan Yapen	2021	2.882.200. 830.000	2.900.016. 470.000	87.006.387 .615	41.060.000.0 00,0000	512.910.0 00.000
Kabupaten Kepulauan Yapen	2022	2.996.491. 180.000	3.014.750. 480.000	128.020.00 0.000	36.170.000.0 00,0000	513.130.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Raya	2015	768.817.46 0.000	786.064.20 0.000	100.603.89 5.000	12.042.269.2 99,0000	676.240.8 40.000
Kabupaten Mamberamo Raya	2016	830.658.81 0.000	849.544.00 0.000	100.603.89 5.000	18.487.764.5 07,0000	726.013.4 40.000
Kabupaten Mamberamo Raya	2017	883.660.12 0.000	904.346.90 0.000	100.603.89 5.000	13.434.158.0 60,0000	726.932.7 35.000
Kabupaten Mamberamo Raya	2018	934.952.57 0.000	957.668.78 0.000	100.603.89 5.000	7.760.000.00 0,0000	720.550.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Raya	2019	989.244.62 0.000	1.013.950. 760.000	79.835.058 .379	7.330.000.00 0,0000	735.690.0 00.000

Kabupaten Mamberamo Raya	2020	991.150.26 0.000	1.017.225. 120.000	59.066.221 .758	9.680.000.00 0,0000	674.150.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Raya	2021	1.003.486. 610.000	1.030.714. 310.000	93.633.110 .879	4.850.000.00 0,0000	667.260.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Raya	2022	1.034.776. 440.000	1.062.651. 940.000	128.200.00 0.000	5.630.000.00 0,0000	669.250.0 00.000
Kabupaten Dogiyai	2015	684.444.69 0.000	704.722.20 0.000	109.139.65 4.000	31.769.771.5 14,0000	498.022.7 07.000
Kabupaten Dogiyai	2016	732.227.79 0.000	753.373.20 0.000	109.139.65 4.000	10.588.067.7 25,0000	496.459.6 27.000
Kabupaten Dogiyai	2017	775.798.09 0.000	797.698.40 0.000	109.139.65 4.000	9.060.168.54 9,0000	496.459.6 27.000
Kabupaten Dogiyai	2018	821.626.03 0.000	844.460.27 0.000	109.139.65 4.000	10.140.000.0 00,0000	492.100.0 00.000
Kabupaten Dogiyai	2019	869.159.04 0.000	892.883.25 0.000	85.434.986 .732	13.965.000.0 00,0000	517.560.0 00.000
Kabupaten Dogiyai	2020	871.431.67 0.000	895.956.53 0.000	61.730.319 .464	7.650.000.00 0,0000	461.020.0 00.000
Kabupaten Dogiyai	2021	881.701.98 0.000	906.903.52 0.000	105.635.15 9.732	9.200.000.00 0,0000	454.360.0 00.000
Kabupaten Dogiyai	2022	888.743.81 0.000	914.005.01 0.000	149.540.00 0.000	47.760.000.0 00,0000	454.620.0 00.000
Kabupaten Waropen	2015	1.123.721. 450.000	1.132.158. 240.000	100.808.61 1.000	6.965.887.11 1,4800	496.470.5 78.000
Kabupaten Waropen	2016	1.229.958. 410.000	1.239.234. 700.000	100.808.61 1.000	6.851.483.62 3,0000	565.381.1 32.000
Kabupaten Waropen	2017	1.324.748. 090.000	1.334.875. 100.000	100.808.61 1.000	3.776.502.47 6,0000	566.178.8 76.000
Kabupaten Waropen	2018	1.419.470. 790.000	1.430.748. 950.000	100.808.61 1.000	3.540.000.00 0,0000	562.530.0 00.000

Kabupaten Waropen	2019	1.496.332.830.000	1.508.372.560.000	72.318.088.512	3.320.000.000,0000	582.790.000.000
Kabupaten Waropen	2020	1.453.776.740.000	1.465.794.810.000	43.827.566.023	7.990.000.000,0000	532.580.000.000
Kabupaten Waropen	2021	1.473.312.840.000	1.485.614.150.000	79.913.783.012	5.950.000.000,0000	522.620.000.000
Kabupaten Waropen	2022	1.543.088.640.000	1.555.738.850.000	116.000.000.000	6.920.000.000,0000	522.620.000.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	2015	1.121.087.410.000	1.132.975.980.000	114.477.328.000	19.182.092.243,0000	818.632.490.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	2016	1.193.864.460.000	1.206.508.600.000	114.477.328.000	20.139.473.413,0000	855.884.604.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	2017	1.265.960.580.000	1.279.445.600.000	114.477.328.000	12.859.510.577,0000	858.602.966.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	2018	1.331.575.050.000	1.345.970.780.000	114.477.328.000	11.850.000.000,0000	851.060.000.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	2019	1.394.490.400.000	1.409.834.790.000	88.535.092.620	22.925.000.000,0000	869.090.000.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	2020	1.392.125.480.000	1.404.476.480.000	62.592.857.239	22.150.000.000,0000	779.530.000.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	2021	1.427.095.700.000	1.444.533.090.000	110.226.428.620	10.580.000.000,0000	764.630.000.000

Kabupaten Pegunungan Bintang	2022	1.474.659.570.000	1.492.532.760.000	157.860.000.000	51.490.000.000,0000	764.630.000.000
Kabupaten Tolikara	2015	882.032.190.000	886.271.790.000	121.144.049.000	18.027.971.780,0000	687.457.196.000
Kabupaten Tolikara	2016	922.389.820.000	926.840.200.000	121.144.049.000	27.827.703.044,0000	741.509.328.000
Kabupaten Tolikara	2017	964.907.370.000	969.512.600.000	121.144.049.000	9.576.673.179,0000	741.509.328.000
Kabupaten Tolikara	2018	1.008.620.240.000	1.013.367.550.000	121.144.049.000	17.690.000.000,0000	734.500.000.000
Kabupaten Tolikara	2019	1.048.202.030.000	1.053.097.030.000	92.951.945.833	17.295.000.000,0000	751.420.000.000
Kabupaten Tolikara	2020	1.053.349.180.000	1.058.376.550.000	64.759.842.666	16.900.000.000,0000	692.350.000.000
Kabupaten Tolikara	2021	1.063.394.290.000	1.068.561.890.000	130.134.921.333	14.170.000.000,0000	677.980.000.000
Kabupaten Tolikara	2022	1.106.863.000.000	1.112.172.950.000	195.510.000.000	67.740.000.000,0000	677.980.000.000
Kabupaten Yalimo	2015	596.674.990.000	599.697.230.000	106.342.752.000	16.080.813.456,0000	595.901.117.000
Kabupaten Yalimo	2016	637.474.030.000	640.684.600.000	106.342.752.000	18.320.960.672,1400	626.319.920.000
Kabupaten Yalimo	2017	670.510.300.000	673.921.900.000	106.342.752.000	24.366.576.413,9400	626.338.013.000
Kabupaten Yalimo	2018	714.095.100.000	717.663.030.000	106.342.752.000	22.440.000.000,0000	620.840.000.000
Kabupaten Yalimo	2019	753.280.520.000	757.061.810.000	83.943.669.458	26.930.000.000,0000	633.770.000.000
Kabupaten Yalimo	2020	760.515.710.000	764.516.700.000	61.544.586.915	8.980.000.000,0000	573.710.000.000

Kabupaten Yalimo	2021	777.868.03 0.000	782.019.34 0.000	104.902.29 3.458	11.490.000.0 00,0000	561.980.0 00.000
Kabupaten Yalimo	2022	815.817.63 0.000	820.057.28 0.000	148.260.00 0.000	8.910.000.00 0,0000	561.980.0 00.000
Kabupaten Puncak Jaya	2015	846.840.99 0.000	855.808.70 0.000	128.559.75 3.000	14.802.617.3 20,0000	659.625.2 44.000
Kabupaten Puncak Jaya	2016	885.587.34 0.000	895.163.10 0.000	128.559.75 3.000	24.744.152.9 62,6700	753.843.0 05.000
Kabupaten Puncak Jaya	2017	918.367.66 0.000	928.543.80 0.000	128.559.75 3.000	10.790.311.9 49,0000	756.469.6 05.000
Kabupaten Puncak Jaya	2018	959.907.33 0.000	970.469.11 0.000	128.559.75 3.000	15.420.000.0 00,0000	749.830.0 00.000
Kabupaten Puncak Jaya	2019	999.104.68 0.000	1.010.150. 200.000	96.591.188 .574	15.220.000.0 00,0000	782.410.0 00.000
Kabupaten Puncak Jaya	2020	957.752.69 0.000	969.317.49 0.000	64.622.624 .148	15.020.000.0 00,0000	701.990.0 00.000
Kabupaten Puncak Jaya	2021	971.091.33 0.000	983.028.73 0.000	122.416.31 2.074	18.370.000.0 00,0000	690.480.0 00.000
Kabupaten Puncak Jaya	2022	999.747.56 0.000	1.012.031. 040.000	180.210.00 0.000	12.480.000.0 00,0000	690.770.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Tengah	2015	601.609.94 0.000	609.493.95 0.000	107.773.28 5.000	14.203.916.4 12,0000	598.199.1 49.000
Kabupaten Mamberamo Tengah	2016	635.911.45 0.000	644.350.70 0.000	107.773.28 5.000	14.380.797.6 68,0000	633.972.6 33.000
Kabupaten Mamberamo Tengah	2017	671.678.03 0.000	680.833.70 0.000	107.773.28 5.000	10.185.211.8 97,0000	637.765.4 77.000

Kabupaten Mamberamo Tengah	2018	706.009.66 0.000	715.594.94 0.000	107.773.28 5.000	7.280.000.00 0,0000	635.800.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Tengah	2019	740.962.01 0.000	750.946.31 0.000	84.658.436 .897	12.550.000.0 00,0000	672.340.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Tengah	2020	747.705.64 0.000	758.149.26 0.000	61.543.588 .793	10.540.000.0 00,0000	605.100.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Tengah	2021	758.453.24 0.000	769.368.16 0.000	98.081.794 .397	9.760.000.00 0,0000	592.700.0 00.000
Kabupaten Mamberamo Tengah	2022	765.215.88 0.000	776.324.27 0.000	134.620.00 0.000	3.850.000.00 0,0000	592.700.0 00.000
Kabupaten Paniai	2015	1.450.064. 840.000	2.443.273. 250.000	115.559.75 3.000	20.358.042.8 46,0000	528.268.8 43.000
Kabupaten Paniai	2016	1.533.658. 260.000	2.607.585. 200.000	115.559.75 3.000	19.447.945.0 98,0000	595.471.7 94.000
Kabupaten Paniai	2017	1.613.821. 480.000	2.731.720. 200.000	115.559.75 3.000	28.434.534.1 18,3800	595.471.7 94.000
Kabupaten Paniai	2018	1.708.675. 720.000	2.909.102. 870.000	115.559.75 3.000	23.900.000.0 00,0000	586.040.0 00.000
Kabupaten Paniai	2019	1.796.382. 090.000	3.020.870. 770.000	89.874.768 .168	24.090.000.0 00,0000	602.790.0 00.000
Kabupaten Paniai	2020	1.788.467. 710.000	3.034.643. 660.000	64.189.783 .336	24.280.000.0 00,0000	541.510.0 00.000
Kabupaten Paniai	2021	1.814.829. 250.000	3.084.641. 370.000	112.854.89 1.668	18.140.000.0 00,0000	538.890.0 00.000
Kabupaten Paniai	2022	1.881.087. 080.000	3.194.456. 640.000	161.520.00 0.000	13.200.000.0 00,0000	538.890.0 00.000

Kabupaten Nduga	2015	619.065.89 0.000	621.272.30 0.000	106.591.12 9.000	3.452.146.19 4,0000	536.200.1 15.000
Kabupaten Nduga	2016	660.687.48 0.000	663.065.70 0.000	106.591.12 9.000	12.005.560.1 40,0000	638.900.1 15.000
Kabupaten Nduga	2017	708.531.75 0.000	711.120.30 0.000	106.591.12 9.000	22.970.961.5 14,5500	63.890.01 1.000
Kabupaten Nduga	2018	749.243.25 0.000	751.960.26 0.000	106.591.12 9.000	14.320.000.0 00,0000	632.950.0 00.000
Kabupaten Nduga	2019	785.485.48 0.000	788.338.05 0.000	84.388.485 .647	17.570.000.0 00,0000	646.260.0 00.000
Kabupaten Nduga	2020	790.847.01 0.000	793.769.18 0.000	62.185.842 .294	6.500.000.00 0,0000	572.100.0 00.000
Kabupaten Nduga	2021	812.205.11 0.000	815.250.86 0.000	111.412.92 1.147	6.170.000.00 0,0000	560.390.0 00.000
Kabupaten Nduga	2022	836.989.98 0.000	840.136.14 0.000	160.640.00 0.000	4.240.000.00 0,0000	560.570.0 00.000
Kabupaten Supiori	2015	642.278.98 0.000	644.639.61 0.000	86.513.444 .000	8.044.297.96 9,0000	421.569.9 70.000
Kabupaten Supiori	2016	670.809.14 0.000	673.172.50 0.000	86.513.444 .000	14.509.129.0 02,5000	455.358.2 38.000
Kabupaten Supiori	2017	697.752.47 0.000	700.180.40 0.000	86.513.444 .000	9.730.575.83 0,0000	455.358.2 38.000
Kabupaten Supiori	2018	726.903.48 0.000	729.404.49 0.000	86.513.444 .000	11.770.000.0 00,0000	451.180.0 00.000
Kabupaten Supiori	2019	758.379.78 0.000	760.965.76 0.000	64.958.039 .766	9.290.000.00 0,0000	464.280.0 00.000
Kabupaten Supiori	2020	766.439.55 0.000	769.119.66 0.000	43.402.635 .532	10.010.000.0 00,0000	416.490.0 00.000
Kabupaten Supiori	2021	778.373.71 0.000	781.179.68 0.000	71.561.317 .766	10.900.000.0 00,0000	408.330.0 00.000

Kabupaten Supiori	2022	801.204.24 0.000	804.107.45 0.000	99.720.000 .000	7.260.000.00 0,0000	408.330.0 00.000
Kabupaten Puncak	2015	643.130.03 0.000	643.976.96 0.000	120.107.73 2.000	8.285.133.76 4,0000	764.949.1 09.000
Kabupaten Puncak	2016	690.204.04 0.000	691.084.70 0.000	120.107.73 2.000	10.405.761.2 25,0000	811.528.5 49.000
Kabupaten Puncak	2017	736.282.67 0.000	737.194.70 0.000	120.107.73 2.000	118.296.744. 687,2800	812.730.4 18.000
Kabupaten Puncak	2018	785.778.28 0.000	786.717.74 0.000	120.107.73 2.000	5.340.000.00 0,0000	805.590.0 00.000
Kabupaten Puncak	2019	823.512.81 0.000	824.465.58 0.000	92.211.919 .212	14.550.000.0 00,0000	826.550.0 00.000
Kabupaten Puncak	2020	824.141.03 0.000	825.111.83 0.000	64.316.106 .423	18.420.000.0 00,0000	748.280.0 00.000
Kabupaten Puncak	2021	830.080.43 0.000	831.070.01 0.000	118.668.05 3.212	6.740.000.00 0,0000	736.190.0 00.000
Kabupaten Puncak	2022	861.713.92 0.000	862.719.35 0.000	173.020.00 0.000	500.000.000, 0000	736.250.0 00.000
Kabupaten Jayawijaya	2015	3.794.403. 350.000	3.850.838. 530.000	117.040.10 4.000	74.572.888.8 07,0000	638.050.4 12.000
Kabupaten Jayawijaya	2016	3.972.485. 450.000	4.030.520. 400.000	117.040.10 4.000	69.994.661.9 91,0000	715.975.6 23.000
Kabupaten Jayawijaya	2017	4.191.917. 310.000	4.252.443. 300.000	117.040.10 4.000	75.889.520.4 63,7400	717.704.3 74.000
Kabupaten Jayawijaya	2018	4.458.448. 040.000	4.252.443. 300.000	117.040.10 4.000	91.840.000.0 00,0000	714.020.0 00.000
Kabupaten Jayawijaya	2019	4.681.233. 290.000	4.746.649. 590.000	84.198.545 .756	76.730.000.0 00,0000	750.790.0 00.000
Kabupaten Jayawijaya	2020	4.524.800. 450.000	4.592.937. 500.000	51.356.987 .511	61.620.000.0 00,0000	673.340.0 00.000

Kabupaten Jayawijaya	2021	4.581.102.200.000	4.650.820.930.000	116.188.493.756	41.610.000.000,0000	662.520.000.000
Kabupaten Jayawijaya	2022	4.845.061.420.000	4.916.082.200.000	181.020.000.000	46.730.000.000,0000	662.520.000.000
Kabupaten Yahukimo	2015	1.232.487.300.000	1.243.125.870.000	110.694.494.000	22.865.226.990,2500	649.719.896.000
Kabupaten Yahukimo	2016	1.289.360.020.000	1.300.443.300.000	110.694.494.000	24.317.485.246,0000	747.355.997.000
Kabupaten Yahukimo	2017	1.367.351.860.000	1.379.175.200.000	110.694.494.000	22.510.120.394,0000	750.847.109.000
Kabupaten Yahukimo	2018	1.441.957.540.000	1.454.566.230.000	110.694.494.000	18.250.000.000,0000	748.280.000.000
Kabupaten Yahukimo	2019	1.513.510.600.000	1.526.966.600.000	88.144.846.036	28.635.000.000,0000	763.670.000.000
Kabupaten Yahukimo	2020	1.512.579.560.000	1.527.284.770.000	65.595.198.072	20.770.000.000,0000	687.760.000.000
Kabupaten Yahukimo	2021	1.540.658.440.000	1.556.231.270.000	138.232.599.036	19.260.000.000,0000	695.670.000.000
Kabupaten Yahukimo	2022	1.567.032.080.000	1.582.682.240.000	210.870.000.000	11.030.000.000,0000	695.670.000.000
Kabupaten Lanny Jaya	2015	922.590.330.000	939.698.440.000	126.725.154.000	17.477.686.133,0000	614.605.407.000
Kabupaten Lanny Jaya	2016	975.918.040.000	994.264.100.000	126.725.154.000	11.053.461.900,0000	635.132.489.000
Kabupaten Lanny Jaya	2017	1.028.447.210.000	1.047.837.300.000	126.725.154.000	58.460.287.592,0000	636.428.751.000
Kabupaten Lanny Jaya	2018	1.082.613.320.000	1.103.034.870.000	126.725.154.000	20.780.000.000,0000	635.660.000.000
Kabupaten Lanny Jaya	2019	1.138.419.300.000	1.159.952.210.000	96.259.480.104	17.560.000.000,0000	658.340.000.000

Kabupaten Lanny Jaya	2020	1.157.799. 470.000	1.180.647. 500.000	65.793.806 .208	14.340.000.0 00,0000	610.080.0 00.000
Kabupaten Lanny Jaya	2021	1.177.967. 560.000	1.202.143. 590.000	124.241.90 3.104	9.570.000.00 0,0000	597.590.0 00.000
Kabupaten Lanny Jaya	2022	1.225.266. 320.000	1.250.245. 500.000	182.690.00 0.000	5.360.000.00 0,0000	597.590.0 00.000
Kabupaten Intan Jaya	2015	647.041.28 0.000	649.345.71 0.000	110.491.53 6.000	6.979.689.71 7,5300	660.758.6 04.000
Kabupaten Intan Jaya	2016	693.418.66 0.000	695.897.20 0.000	110.491.53 6.000	18.243.656.9 73,4800	706.242.2 69.000
Kabupaten Intan Jaya	2017	718.803.07 0.000	721.390.10 0.000	110.491.53 6.000	5.346.128.60 0,0000	707.076.8 57.000
Kabupaten Intan Jaya	2018	738.779.96 0.000	741.540.23 0.000	110.491.53 6.000	9.040.000.00 0,0000	700.870.0 00.000
Kabupaten Intan Jaya	2019	758.857.45 0.000	761.705.08 0.000	86.123.978 .191	17.560.000.0 00,0000	717.340.0 00.000
Kabupaten Intan Jaya	2020	755.934.81 0.000	758.845.04 0.000	61.756.420 .382	17.040.000.0 00,0000	641.350.0 00.000
Kabupaten Intan Jaya	2021	764.057.58 0.000	767.000.96 0.000	105.143.21 0.191	24.550.000.0 00,0000	629.090.0 00.000
Kabupaten Intan Jaya	2022	784.205.62 0.000	787.235.27 0.000	148.530.00 0.000	24.090.000.0 00,0000	629.500.0 00.000
Kabupaten Deiyai	2015	679.523.76 0.000	686.959.47 0.000	104.235.69 3.000	7.465.425.59 4,0000	436.570.1 39.000
Kabupaten Deiyai	2016	733.448.51 0.000	741.298.70 0.000	104.235.69 3.000	7.604.515.30 8,0000	471.509.3 68.000
Kabupaten Deiyai	2017	768.694.98 0.000	776.908.90 0.000	104.235.69 3.000	1.969.108.72 3,0000	474.206.8 51.000
Kabupaten Deiyai	2018	795.074.21 0.000	803.578.85 0.000	104.235.69 3.000	1.260.000.00 0,0000	475.400.0 00.000

Kabupaten Deiyai	2019	824.809.77 0.000	833.647.32 0.000	82.287.400 .292	1.985.000.00 0,0000	502.440.0 00.000
Kabupaten Deiyai	2020	821.635.25 0.000	830.729.06 0.000	60.339.107 .583	2.710.000.00 0,0000	456.140.0 00.000
Kabupaten Deiyai	2021	831.950.27 0.000	841.195.52 0.000	97.579.553 .792	4.860.000.00 0,0000	447.050.0 00.000
Kabupaten Deiyai	2022	863.789.72 0.000	873.276.53 0.000	134.820.00 0.000	53.070.000.0 00,0000	447.600.0 00.000

Lampiran 2

Common Effect Model

Dependent Variable: Y1				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/10/24 Time: 21:56				
Sample: 2015 2022				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 29				
Total panel (balanced) observations: 232				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.69E+12	1.25E+12	1.354628	0.1769
X1	-24.20841	8.032325	-3.013873	0.0029
X2	4.189930	1.512475	2.770248	0.0061

X3	- 0.92673 6	4.078049	- 0.227250	0.8204
X4	22.2443 3	2.110368	10.54050	0.0000
Root MSE	3.38E+ 12	R-squared		0.384190
Mean dependent var	3.12E+ 12	Adjusted R- squared		0.373339
S.D. dependent var	4.32E+ 12	S.E. of regression		3.42E+12
Akaike info criterion	60.5781 3	Sum squared resid		2.65E+27
Schwarz criterion	60.6524 1	Log likelihood		-7022.063
Hannan-Quinn criter.	60.6080 9	F-statistic		35.40504
Durbin-Watson stat	0.12132 7	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 3

Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y1				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/10/24 Time: 21:57				
Sample: 2015 2022				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 29				
Total panel (balanced) observations: 232				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.83E+12	4.51E+11	8.485635	0.0000
X1	-1.807266	1.164468	-1.552010	0.1222
X2	-1.700076	0.641229	-2.651277	0.0087
X3	3.541090	0.620749	5.704543	0.0000
X4	1.489063	0.536094	2.777616	0.0060
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	4.13E+11	R-squared		0.990821
Mean dependent var	3.12E+12	Adjusted R-squared		0.989344
S.D. dependent var	4.32E+12	S.E. of regression		4.45E+11
Akaike info criterion	56.61353	Sum squared resid		3.95E+25

Schwarz criterion	57.10380	Log likelihood	- 6534.17 0
Hannan-Quinn criter.	56.81125	F-statistic	671.247 7
Durbin-Watson stat	0.572540	Prob(F-statistic)	0.00000 0

Lampiran 4

Random Effect Model

Dependent Variable: Y1				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 07/10/24 Time: 21:59				
Sample: 2015 2022				
Periods included: 8				
Cross-sections included: 29				
Total panel (balanced) observations: 232				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.71E+12	7.47E+11	4.966881	0.0000
X1	-1.907988	1.163863	-1.639358	0.1025
X2	-1.515579	0.633466	-2.392519	0.0175
X3	3.500370	0.620448	5.641683	0.0000
X4	1.705909	0.534101	3.193985	0.0016
Effects Specification				

			S.D.	Rho
Cross-section random			3.23E+12	0.9813
Idiosyncratic random			4.45E+11	0.0187
	Weighted Statistics			
Root MSE	4.60E+1 1	R-squared		0.19369 5
Mean dependent var	1.52E+1 1	Adjusted R-squared		0.17948 7
S.D. dependent var	5.14E+1 1	S.E. of regression		4.65E+ 11
Sum squared resid	4.92E+2 5	F-statistic		13.6327 9
Durbin-Watson stat	0.450474	Prob(F-statistic)		0.00000 0
	Unweighted Statistics			
R-squared	0.045321	Mean dependent var		3.12E+ 12
Sum squared resid	4.11E+2 7	Durbin-Watson stat		0.00539 6

Lampiran 5

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.

Cross-section F	469.6821 41	(28,199)	0.0000
Cross-section Chi-square	975.7860 44	28	0.0000

Lampiran 6

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.89779 4	4	0.0001